



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan lindungan – Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 yang merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Daerah akan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tergambar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang diarahkan pada pencapaian sasaran dan tujuan dalam rangka merealisasikan Misi, demi mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu : ***“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”***.

Berdasarkan Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) Misi , 8 (delapan) Tujuan, 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

LAKIP Tahun 2025 merupakan LAKIP Tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029. LAKIP Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu ***“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN.”***

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi - misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan
2. Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi Yang Inklusif
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal
4. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
6. Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting

LAKIP Tahun 2025 merupakan LAKIP Tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025 – 2029. LAKIP Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada 2 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Perubahan Tahun 2025 – 2026 pada masa transisi Kepemimpinan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun *Good Governance* sekaligus *Result Oriented Government*.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) Misi, 8 (delapan) Tujuan, 18 (delapan belas) Sasaran, 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 – 2029, sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 (tahun pertama) dengan capaian **102,98%** atau dengan sebutan **“Sangat Berhasil”** yang diperoleh dengan jumlah persentase misi dibagi dengan jumlah misi, capaian misi diperoleh dengan jumlah persentase sasaran pada misi dibagi dengan jumlah sasaran dan pencapaian sasaran diperoleh dengan jumlah persentase indikator dalam sasaran dibagi dengan jumlah indikator.

Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Perubahan Tahun 2025 – 2026 pada masa transisi Kepemimpinan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun *Good Governance* sekaligus *Result Oriented Government*.

LAKIP ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian Misi, capaian Sasaran, capaian Indikator RPJMD dan capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2029.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyadari bahwa LAKIP ini belum memuat informasi akuntabilitas kinerja secara lengkap dan sempurna, karena berbagai keterbatasan sehingga segala saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam rangka penyempurnaan di tahun – tahun mendatang.



SoE, 17 Maret 2026
Bupati Timor Tengah Selatan,

Edward Markus Lioe

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	

LAMPIRAN VI : LAMPIRAN IKU 2025-2029.....

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAKIP KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja instansi pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara menyeluruh.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025 – 2029. LAKIP Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada 2 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Perubahan Tahun 2025 – 2026 pada masa transisi Kepemimpinan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun *Good Governance* sekaligus *Result Oriented Government*.

LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah **“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**, untuk menjawab visi tersebut, maka dijabarkan lebih lanjut dalam 6 (enam) Misi , 8 (delapan) Tujuan, 18

(delapan belas) Sasaran Strategis dan 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 147 Seri E Nomor 135);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 3)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
26. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);

C. Gambaran Umum Daerah

1. Keadaan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa, dengan luas wilayah 3.995,56 Km².

Batas-batas Wilayah Administratif Kabupaten TTS adalah :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan



Sumber : RTRW Kab TTS 2012-2032

Secara rinci nama kecamatan, jumlah desa/kelurahan, luas wilayah kecamatan dan persentase luas wilayah kecamatan dari luas wilayah kabupaten disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah Kecamatan dan
Persentase Luas Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelrh.	Luas (Km ²)	Presentase Luas (%)
1.	Mollo Utara	18	208,22	5,26
2.	Fatumnasi	5	198,65	5,02
3.	Tobu	8	98,89	2,50
4.	Nunbena	6	134,49	3,40
5.	Mollo Selatan	7	147,18	3,72
6.	Pollen	11	250,29	6,33
7.	Mollo Barat	6	165,14	4,18
8.	Mollo Tengah	5	99,69	2,52
9.	Kota SoE	13	28,08	0,71
10.	Amanuban Barat	8	114,30	2,89
11.	Batu Putih	7	102,32	2,59
12.	Kuatnana	8	141,22	3,57
13.	Amanuban Selatan	10	326,01	8,24
14.	Noebeba	7	186,02	4,70
15.	Kuanfatu	13	136,52	3,45
16.	Kualin	8	195,84	4,95
17.	Amanuban Tengah	11	87,71	2,22
18.	Kolbano	8	108,70	2,75
19.	Oenino	11	154,96	3,92
20.	Amanuban Timur	10	149,26	3,77
21.	Fautmolo	7	46,34	1,17
22.	Fatukopa	7	65,59	1,66
23.	KiE	13	162,78	4,12
24.	Kot'olin	8	58,94	1,49
25.	Amanatun Selatan	13	82,64	2,09
26.	Boking	7	94,58	2,39
27.	Nunkolo	9	69,09	1,75
28.	Noebana	5	49,63	1,25
29.	Santian	5	48,17	1,22
30.	Amanatun Utara	9	105,84	2,64
31.	Toianas	9	103,95	2,63
32.	Kokbaun	6	34,32	0,87
	Jumlah	278	3.995,56	100

Sumber : TTS Dalam Angka

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak diantara : 9° 28, 13" - 10° 10, 26" LS dan 120° 04,00" - 124° 04, 00" BT. Kabupaten Timor Tengah Selatan juga dekat dengan Kota Kupang sebagai Ibu Kota Propinsi, di samping itu juga berdekatan dengan Kota Malaka, Kota Atambua, Kota Kefamenanu dan Kota Oelamasi sebagai Kota terdepan menuju Negara Timor Leste.

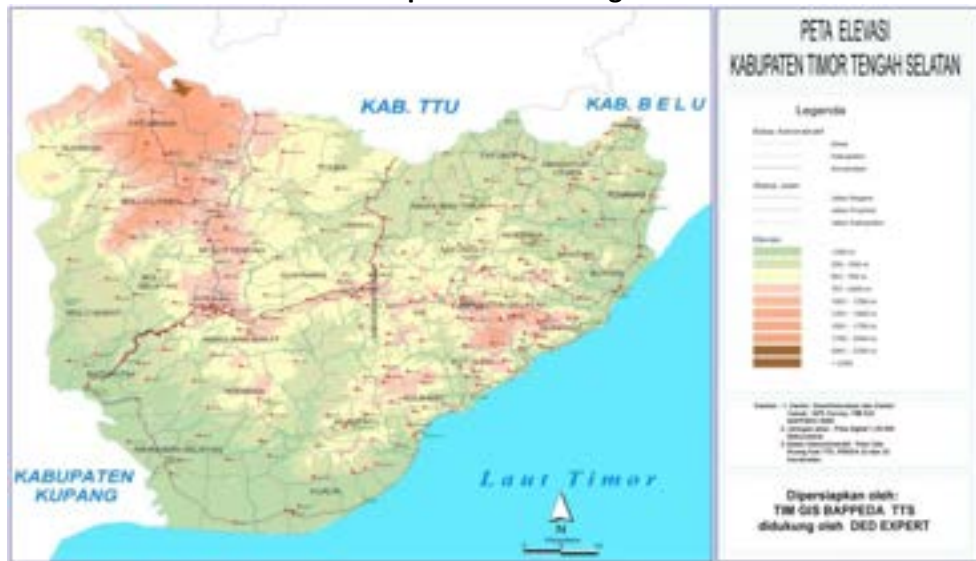
c. Topografi

Topografi umumnya menyuguhkan relief dan identitas suatu bentuk bentang lahan (*landform*) yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian/elevasi (*altitude*) dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah pantai. Berdasarkan elevasi, maka wilayah Kabupaten TTS dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 256.697,31 Km² atau 64,91%
- Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 118.402,18 Km² atau 29,94%
- Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 18.306,60 Km² atau 4,63%
- Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 2.041,61 Km² atau 0,52%

Visualisasi kondisi topografi Kabupaten Timor Tengah Selatan disajikan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Peta Elevasi Kabupaten Timor Tengah Selatan



Sumber : Bappeda Kab.TTS

Peta elevasi pada gambar 1.2. menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada ketinggian yang beragam yaitu antara ketinggian 0 – 2500 mdpl.

d. Geologi

Secara fisiografi daerah Timor Barat digolongkan dalam 5 satuan fisiografi (Rosidi dkk, 1979) yaitu : pegunungan kasar, dataran tinggi, pegunungan bergelombang, Fatu (istilah untuk gunung/batu yang dipakai oleh Rosidi dkk, 1979) dan Dataran rendah. Unsur-unsur struktur yang dominan di pulau Timor ialah lipatan ketat, sesar naik dan mendatar, sedangkan sesar turun kurang begitu dominan. Kondisi Geologi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada Peta berikut ini:

Gambar 1.3.
Peta Geologi Kabupaten Timor Tengah Selatan



Sumber : RTRW Kab. TTS 2012-2032

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan keadaan 31 Desember 2025 menurut jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

> Laki – laki : 252.029 jiwa

> Perempuan : 254.834 jiwa

Jumlah : 506.863 jiwa

> Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **142.204** Kepala Keluarga.

b. Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan ± 120 jiwa per Km². Sedangkan kepadatan agraris sekitar 4 Ha per Kepala Keluarga.

c. Distribusi Penduduk

Distribusi Penduduk menyebar pada Daerah-daerah potensial ± 92 % tinggal di daerah pedesaan dan 8 % tinggal di daerah perkotaan.

d. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,41 %.

3. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1), maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, 3 Asisten dan 9 (sembilan) Bagian
- b. Staf Ahli Bupati 3 (tiga) Jabatan
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 (tiga) Bagian
- d. Inspektorat
- e. Dinas-dinas Daerah sebanyak 23 (dua puluh tiga) Unit
- f. Badan 5 (lima) Unit
- g. Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Kecamatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Unit
- i. Kelurahan sebanyak 12 (dua belas) Unit
- j. UPTD sebanyak 6 (enam) Unit
- k. Perumda 1 (satu) Unit dan BUMD 1 (satu) unit
- l. Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSPD (LPPL RSPD) sebanyak 2 (dua) Unit.

4. Sumber Daya Aparatur

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

Jumlah Pegawai di Kabupaten Timor Tengah Selatan keadaan 31 Desember 2025 menurut golongan adalah sebagai berikut :

-	Golongan IV	:	379 Orang
-	Golongan III	:	3.729 Orang
-	Golongan II	:	1.213 Orang
-	Golongan I	:	31 Orang
	Jumlah	:	5.352 Orang

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai di Kabupaten Timor Tengah Selatan keadaan 31 Desember 2024 menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

-	S 2	:	174 Orang
-	S 1	:	2.779 Orang
-	D IV	:	134 Orang
-	D III	:	755 Orang
-	D II	:	170 Orang
-	D I	:	34 Orang
-	SLTA	:	1.246 Orang
-	SLTP	:	41 Orang
-	SD	:	19 Orang
	Jumlah	:	5.352 Orang

D. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan digunakan model analisis SWOT (*Strenghts/ kekuatan, Weaknesses / Limitations / kelemahan, Opportunities / peluang dan Threats/ ancaman*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan eksternal (Peluang dan Ancaman) dengan tujuan untuk mengetahui dinamika lingkungan eksternal dikaitkan dengan sumber daya internal yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini, maka dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Memiliki jumlah penduduk yang banyak;
- b. Memiliki wilayah yang luas;
- c. Memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam (motif/tenunan, alat musik, tarian, ukiran);
- d. Memiliki flora dan fauna yang bersifat endemik, antara lain cendana, ampupu, jeruk keprok, umbi-umbian, sorgum, rusa, sapi, penyu hijau;
- e. Ketinggian tempat bervariasi antara 0 m dpl s/d 2.500 m dpl;
- f. Memiliki 2 dataran yang luas sebagai lahan pertanian yaitu dataran Baus dan dataran Bena;
- g. Merupakan hulu dari 2 DAS besar di Pulau Timor yaitu DAS Noelmina dan DAS Benenain;
- h. Memiliki potensi tambang yang cukup besar;
- i. Sebagian besar penduduk menetap di desa dan bekerja sebagai petani/peternak;
- j. Adanya kelembagaan pemerintah daerah;
- k. Memiliki garis pantai yang panjang dan potensi laut yang melimpah;
- l. Adanya ruas-ruas jalan kabupaten yang terkoneksi langsung ke jalan provinsi, jalan nasional dan jalan strategis nasional.

2. Kelemahan

- a. Permukiman penduduk tidak terkonsentrasi dan jauh dari berbagai sarana pelayanan publik;
- b. Sebagian besar penduduk usia produktif tidak berijazah dan hanya tamat SD;

- c. Banyak penduduk yang belum memiliki akses terhadap listrik, air dan rumah layak huni;
- d. Potensi sumber daya alam masih dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- e. Budaya bertani dengan cara tebas bakar dan berpindah-pindah serta belum berorientasi ekonomi;
- f. Etos kerja rendah;
- g. Aktivitas pembangunan belum mengacu pada RTRW;
- h. Pendapatan per kapita rendah;
- i. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap anggaran dari pemerintah pusat;
- j. PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat kecil;
- k. Banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan;
- l. Banyak angkatan kerja yang menganggur;
- m. Kabupaten TTS tergolong sebagai salah satu Kabupaten Miskin dan tertinggal;
- n. Sebagian besar prasarana jalan dan air bersih dalam keadaan rusak berat;
- o. Jumlah tenaga guru, dokter dan paramedis belum memadai;
- p. Banyak aset pemerintah yang belum dibangun, didata dan disertifikasi.

3. Peluang

- a. Posisi strategis, dekat dengan Ibu Kota Provinsi dan 3 Kabupaten, dilalui jalur jalan nasional dan jalan strategis nasional serta pantai selatan berhadapan langsung dengan Benua Australia;
- b. Kota SoE ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRWN;
- c. Pantai Selatan Laut Timor masuk dalam Zona Taman Nasional Laut Sawu;
- d. Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam jalur pengembangan listrik Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bali-Nusa Tenggara;
- e. Adanya aktivitas bank dan lembaga keuangan mikro (koperasi);
- f. Tingginya minat pengusaha berinvestasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- g. Adanya NGO Internasional, Perguruan Tinggi dan Swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- h. Adanya regulasi pengalihan pengelolaan pajak ke tingkat kabupaten;

- i. Nusa Tenggara Timur masuk dalam wilayah implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor V;
- j. Adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk kebijakan dan dana.

4. Ancaman

- a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja produktif yang mencari pekerjaan/bekerja di luar daerah;
- b. Beberapa komoditi pertanian yang dapat diproduksi secara lokal didatangkan dalam jumlah besar dari luar daerah (sirih, pinang, jagung, beras);
- c. Pasar tenaga kerja untuk jasa boga, jasa pertukangan dan perdagangan didominasi pendatang dari luar daerah (warung, tukang);
- d. Masih marak terjadinya praktek ijon untuk penjualan produk pertanian.

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka isu-isu strategis Kabupaten TTS dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Isu-Isu Strategis Yang Berhubungan Dengan Aspek Geografi (kewilayahan) dan Demografi (kependudukan)

a. Ketinggian Wilayah Dari Permukaan Laut Bervariasi

Seluruh wilayah Kabupaten TTS merupakan daratan dengan ketinggian wilayah yang bervariasi yaitu dari 0 m dpl - 2.500 m dpl. Secara geografis, kondisi ini sangat menguntungkan karena tipikal wilayah yang demikian sangat cocok untuk pengembangan usaha pertanian dengan komoditas yang bervariasi. Selain memiliki daratan yang luas, Kabupaten TTS juga memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu sepanjang 101,8 km memberikan peluang menjanjikan bagi pengembangan potensi wisata pantai serta pengelolaan kekayaan hasil laut yang dapat diandalkan.

b. Sebagian Besar Penduduk Adalah Petani yang Tinggal di Pedesaan dengan Tingkat Pendapatan yang Sangat Rendah.

Sebagian besar penduduk kabupaten TTS tinggal di pedesaan dengan pekerjaan utama sebagai petani adalah kekuatan yang potensial untuk membangun perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat dengan melakukan kegiatan pertanian berbasis komoditas unggulan daerah.

c. Penduduk Taat Beragama dan Kuat Memegang Adat Istiadat/ Budaya.

Keadaan penduduk dengan jumlah pemeluk agama yang paling besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak beragama adalah keadaan yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis antar masyarakat sehingga meminimalkan konflik dan kenyamanan dalam menjalankan segala aktivitas.

d. Kerusakan Lingkungan

Sebagai akibat dari berbagai aktifitas penggunaan lahan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kerusakan yang terlihat adalah pada vegetasi penutup lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, terdapatnya aktifitas perladangan berpindah, penyediaan kayu baik untuk kebutuhan bahan bakar maupun bahan bangunan serta pada titik-titik penambangan secara ilegal.

2. Isu Strategis Yang Berhubungan Dengan Aspek Kesejahteraan Sosial

a. Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Kurang Mendukung Kelancaran Aktifitas Masyarakat.

Kondisi sarana infrastruktur dasar yang ada di Kabupaten TTS belum memadai dalam hal kuantitas maupun kualitas. Walaupun memiliki peran penting sebagai pendukung berbagai aktifitas pembangunan namun kondisi sebagian besar sarana infrastruktur dasar yang ada mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi terutama disebabkan oleh usia sarana yang rata-rata sudah melewati umur ekonomis namun belum sempat dilakukan pemeliharaan/pengembangan.

b. Ketersediaan Fasilitas Layanan Dasar Belum Memadai dan Dinikmati oleh Seluruh Masyarakat

Pelayanan air bersih, listrik dan rumah layak huni untuk sementara banyak dijumpai pada wilayah perkotaan (kota kabupaten/kota kecamatan) sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat mengandalkan sumber daya yang ada dalam kuantitas dan kualitas yang sangat terbatas.

c. Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Kesenjangan Gender.

Budaya patrilineal yang dianut telah menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan oleh masyarakat. Pemahaman yang keliru

tentang konsep ini telah menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pemahaman ini kemudian meluas pada aspek pembangunan yang lain, dimana pihak laki-laki masih ditempatkan sebagai pemeran utama termasuk dalam pengambilan keputusan.

3. Isu Strategis yang Berhubungan Dengan Aspek Daya Saing Daerah

a. Rendahnya Produktivitas dan Etos Kerja Masyarakat

Dari sisi jumlah hanya sebagian kecil penduduk yang memanfaatkan waktu secara efektif untuk bekerja dan menghasilkan barang/jasa yang bernilai dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menambah pendapatan. Rendahnya produktivitas dan etos kerja berhubungan erat dengan tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat menunjuk pada kemampuan untuk mengakses dan menerapkan ilmu dan teknologi dalam berusaha serta buruknya prasarana infrastruktur wilayah serta akses ke pusat-pusat perekonomian masyarakat.

b. Dana Pemerintah Merupakan Penggerak Utama Perekonomian Daerah

Aktifitas perekonomian masyarakat bergairah setelah adanya implementasi program dan kegiatan pemerintah. Kucuran dana pemerintah menjadi lokomotif bagi pergerakan sektor lainnya, implikasinya semakin besar dana yang dialokasikan oleh pemerintah akan semakin giat pula aktifitas Perekonomian sektor lainnya.

c. Minat Berwirausaha

Wirausaha merupakan potensi pembangunan dalam membuka lapangan kerja baru, guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Dewasa ini animo masyarakat terhadap kewirausahaan masih rendah dikarenakan Sumber Daya Manusia rendah dan akses terhadap modal dari lembaga keuangan masih terbatas. Dengan mendorong minat berwirausaha maka akan meningkatkan sumber pendapatan dan lapangan kerja baru.

d. Tenaga Kerja Tidak Terampil

Akibat dari kurangnya kesempatan penduduk usia produktif mendapatkan pendidikan/pelatihan tenaga kerja maka dengan bermodalkan ijazah terakhir para pencari kerja asal Kabupaten TTS mencoba mengadu nasib mencari pekerjaan di luar daerah bahkan luar negeri. Konsekuensi logisnya adalah mereka menjadi

komoditas yang dapat diperjual belikan dan cenderung menjadi korban kekerasan yang berujung kematian.

E. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan serta untuk menjawab Isu-isu Strategis yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisa SWOT Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan umum pembangunan, yaitu :

No.	Strategi		Arah Kebijakan
<i>Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan</i>			
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan kabupaten yang berstatus maupun non status disertai fasilitas perlengkapan jalan	:	Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis kabupaten serta ruas jalan kabupaten lainnya
		:	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan non status kewenangan kabupaten
		:	Pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
2.	Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra	:	Peningkatan cakupan layanan informasi
3.	Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat sampai pelosok	:	Penyediaan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu
4.	Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan pengolahan sampah	:	Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir
5.	Meningkatkan kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah-daerah irigasi potensial sebagai lumbung pangan daerah	:	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi
		:	Meningkatkan produksi pertanian
6.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi wilayah atau kawasan yang telah berubah fungsi serta mempertahankan wilayah yang masih terpelihara	:	Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya)
		:	Peningkatan mitigasi, pasca dan tanggap bencana
		:	Peningkatan konservasi air dan lahan
		:	Peningkatan pengawasan dan pembinaan aktivitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan

Misi 2: Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi yang Inklusif			
1.	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	:	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan
		:	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
		:	Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah
		:	Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran
2.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, muda dan terjangkau	:	Peningkatan peran dan dukungan pemerintah desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan
		:	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat
		:	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
		:	Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
3.	Meningkatkan pembangunan inklusif dan responsif terhadap perempuan dan anak serta penyandang disabilitas	:	Penguatan regulasi dan penegakan hukum
		:	Perluasan akses layanan dasar yang inklusif
		:	Pemberdayaan ekonomi dan social
		:	Pengembangan Sekoper (Sekolah Perempuan)
4.	Pengembangan generasi muda yang berdaya saing	:	Peningkatan akses dan fasilitas olah raga
		:	Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga
		:	Peningkatan partisipasi kepemudaan dan wirausaha muda
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal			
1.	Meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	:	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif
		:	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Bumdes dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan akses pembiayaan
		:	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi

Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan		
1.	Mendorong kreatifitas dan langkah inovatif melalui reward dan punishment untuk semua kumponen pengelola PAD	: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD : Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	: Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital berdasarkan SOP dan ketentuan yang telah ditetapkan
2.	Menata area atau wilayah birokrasi yang menghambat pelayanan publik	: Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan bertanggung jawab	: Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
		: Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan penguatan peran pengawasan internal
		: Optimalisasi penganggaran pada urusan wajib pelayanan dasar
4.	Meningkatkan kualitas penilaian capaian kinerja dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah	: Peningkatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Misi 6: Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting		
1.	Penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	: Pemenuhan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin
		: Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
		: Pemutakhiran data kemiskinan sampai pada level By Name By Address (BNBA)
2.	Meningkatkan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting	: Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah
		: Optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. TTS Tahun 2025 - 2029

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, menyajikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah, Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah, serta Sistematika Penulisan.

- BAB II : PERENCANAAN KINERJA, menyajikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu : Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan uraian ringkas Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran, uraian ringkas dan rinci Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV : PENUTUP, menyajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala / masalah, Strategi Pemecahan dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk menghindari hambatan / kendala / masalah yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
- LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Pernyataan Visi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025 – 2029 adalah ***“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN.”***

Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. **Timor Tengah Selatan**, meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 32 (tiga puluh dua) kecamatan, 12 (dua belas) kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, 20 (dua puluh) desa persiapan serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan didirikan pada tahun 1958 hingga sekarang.
2. **Maju**, bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus harus mampu membawa Kabupaten Timor Tengah Selatan keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.
3. **Mandiri**, bahwa segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam harus mampu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan efektif untuk kemajuan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. **Sejahtera**, bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar, mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. **Berkelanjutan**, bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten sampai terwujudnya tujuan pembangunan

dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Pernyataan Misi

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 1 angka 13, misi adalah rumusan mengenai apa saja yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi di atas. Misi Kabupaten TTS Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN

Misi ini dimaksudkan untuk membangun, memperbaiki dan merekonstruksi infrastruktur secara berkelanjutan yang dilaksanakan bertahap maupun sekaligus dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.

2. MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter dan berdaya saing dalam segala aspek dengan tetap memperhatikan prinsip inklusi.

3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan koperasi). Pengembangan sektor-sektor unggulan ini diharapkan menjadi daya ungkit ekonomi bagi sektor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

4. MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI BERKELANJUTAN

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan strategi pemerintah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah.

5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang mencakup berbagai aspek, termasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, partisipasi masyarakat serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING

Misi ini dimaksudkan bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan keluarga yang memiliki anak stunting.

C. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Penetapan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan
2025 - 2029**

No.	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan	:	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	:	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur	:	Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis kabupaten serta ruas jalan kabupaten lainnya
						:	jalan kabupaten yang berstatus maupun non status disertai fasilitas perlengkapan jalan	:	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan non status kewenangan kabupaten
								:	Pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
						:	Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra	:	Peningkatan cakupan layanan informasi
				:	Peningkatan cakupan	:	Meningkatkan kemitraan	:	Penyediaan rumah layak

				rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi yang layak dan aman		dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat sampai pelosok		huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu
				: Peningkatan sistem pengelolaan sampah	:	Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan pengolahan sampah	:	Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir
				: Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	:	Meningkatkan kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah-daerah irigasi potensial sebagai lumbung pangan daerah	:	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi
				: Peningkatan	:	Meningkatkan kelestarian	:	Meningkatkan produksi pertanian
								Optimalisasi regulasi dan

				pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim		lingkungan hidup melalui rehabilitasi wilayah atau kawasan yang telah berubah fungsi serta mempertahankan wilayah yang masih terpelihara	peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya)
							: Peningkatan mitigasi, pasca dan tanggap bencana
							: Peningkatan konservasi air dan lahan
							: Peningkatan pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan
2.	Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi	:	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh	:	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	:	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau
							: Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan
							: Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

	yang Inklusif		masyarakat.				:	Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah
							:	Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran
					Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, muda dan terjangkau	:	Peningkatan peran dan dukungan pemerintah desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan
				:			:	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat
							:	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu

								dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan
								Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan : digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
		:	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	:	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	:	Meningkatkan pembangunan inklusif dan responsif terhadap perempuan dan anak serta penyandang disabilitas	: Penguatan regulasi dan penegakan hukum
								: Perluasan akses layanan dasar yang inklusif
								: Pemberdayaan ekonomi dan social
								: Pengembangan Sekoper (Sekolah Perempuan)
				:	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha,	:	Pengembangan generasi muda yang berdaya saing	: Peningkatan akses dan fasilitas olah raga
								: Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga

					olahraga dan seni.				: Peningkatan partisipasi kepemudaan dan wirausaha muda
3.	Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal	:	Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	:	Peningkatan pendapatan masyarakat	:	Meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	: Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif : Pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Bumdes dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan akses pembiayaan : Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi	
4.	Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui	:	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah	:	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan	:	Mendorong kreatifitas dan langkah inovatif melalui reward dan	: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber PAD	

	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan				sumber sumber PAD		punishment untuk semua kumponen pengelola PAD	:	Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan	:	Peningkatan kualitas pelayanan publik	:	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	:	Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital berdasarkan SOP dan ketentuan yang telah ditetapkan
				:	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	:	Menata area atau wilayah birokrasi yang menghambat pelayanan publik	:	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
				:	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	:	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan bertanggung jawab	:	Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
								:	Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan penguatan peran pengawasan internal

								Optimalisasi penganggaran pada urusan wajib pelayanan dasar
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah		Meningkatkan kualitas penilaian capaian kinerja dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah	Peningkatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
6.	Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting		Terwujudnya pengentasan kemiskinan		Penurunan angka kemiskinan		Penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	Pemenuhan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin
								Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
								Pemutakhiran data kemiskinan sampai pada level By Name By Address (BNBA)
			Terwujudnya pengentasan stunting		Penurunan prevalensi stunting		Meningkatkan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan	Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui

							dan penurunan stunting		pengembangan inovasi daerah
								:	Optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. TTS Tahun 2025 - 2029

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja, secara substansi, merupakan komitmen dan kesepakatan pimpinan organisasi dan atasan atau stakeholder-nya untuk mencapai atau mewujudkan kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati berdasarkan sumber daya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hal-hal yang diperjanjikan dalam perencanaan kinerja harus selaras dengan yang ditetapkan dalam dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, dan rencana kerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Indikator Kinerja dalam matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 – 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2023 yang merupakan komitmen tertulis terhadap Rencana Kinerja yang akan dikerjakan dan diupayakan untuk dicapai dalam tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dalam kalender kerja RPJMD dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu : ***“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN.”***, yang penjabarannya melalui 6 Misi , 8 Tujuan, 18 Sasaran Strategis dan 43 Indikator Kinerja.

Dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk menjawab Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Pemda dan Indikator Sasaran Strategis Pemda, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2024 telah menetapkan dan mengalokasikan sejumlah anggaran sebesar **Rp 1.704.309.743.178** dalam APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 untuk membiayai 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja. Sasaran yang ingin dicapai

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian indikator sasaran, sasaran, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis untuk pencapaian misi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Pencapaian IKU Kabupaten dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN IKU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 2025 - 2029

	Misi 1	:	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN				
	Sasaran 1	:	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	53,07	41,93	79,01	61,03	68,70
2.	persentase jembatan dalam kondisi baik.	%	-	72,73	72,73	-	0
3.	Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	%	10,74	3,02	28,12	19,28	15,66
4.	Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	53,22	55,00	103,34	59,54	92,37

Hasil Analisis :

1.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebanyak 52,91 %, menjadi 41,93 % pada tahun 2025 dengan persentase capaian menurun 10,98 % Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan Target 53,07% pada tahun 2025, realisasi 41,93%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 79,01% (cukup berhasil). Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 61,03%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 41,93%, dengan persentase capaian 68,70%
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2025 tidak ada peningkatan atau tidak dilaksanakan Persentase jembatan dalam kondisi baik dengan Target 0% pada tahun 2025, realisasi 0%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 0% (tidak berhasil) Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 0% (tidak ditargetkan), realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 72,73%, dengan persentase capaian 72,73%
3.	Persentase jaringan jalan non status dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebanyak 9,76% menjadi 3,02% atau menurun 6,74%.
	Persentase jaringan jalan non status dalam kondisi baik dengan Target 10,74% pada tahun 2025, realisasi 3,02%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 28,12% (tidak berhasil)

	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 19,28%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 3,02%, dengan persentase capaian 15,66%
4.	Persentase jaringan internet yang dapat diakses pada tahun 2024 adalah 52,00% menjadi 55,00% atau menurun 3,00%.
	Persentase jaringan internet yang bisa diakses dengan Target 53,22% pada tahun 2025, realisasi 55,00%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 103,34% (sangat berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 59,54%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 55,00%, dengan persentase capaian 92,37%

SASARAN 2			:	Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase rumah layak huni	%	54,70	53,98	98,68	54,88	98,36
2.	Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	100	87,50	87,50	100	87,50
3.	Rasio Elektrifikasi	Rasio	92,35	-	0	100	0
4.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	60,26	60,19	99,88	64,33	93,56
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	53,55	52,40	97,85	55,37	94,64

Hasil Analisis :

1.	Persentase Rumah layak huni pada tahun 2024 adalah 54,69% menjadi 52,40% atau menurun 2,29%.
	Persentase Rumah layak huni dengan Target 54,70% pada tahun 2025, realisasi 53,98%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 98,68% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 54,88%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 53,98%, dengan persentase capaian 98,36%
2.	Persentase Rumah korban bencana yang dibangun pada tahun 2024 adalah 100% menjadi 87,50% atau menurun 22,50%.
	Persentase Rumah korban bencana yang dibangun dengan Target 100% pada tahun 2025, realisasi 87,50%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 87,50% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 100%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 87,50%, dengan persentase capaian 87,50%
3.	Persentase Rumah korban bencana yang dibangun pada tahun 2024 adalah 100% menjadi 87,50% atau menurun 22,50%.
	Persentase Rumah korban bencana yang dibangun dengan Target 100% pada tahun 2025, realisasi 87,50%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 87,50% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 100%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 87,50%, dengan persentase capaian 87,50%

4.	Persentase Penduduk berakses air minum layak pada tahun 2024 adalah 59,04% menjadi 60,19% atau meningkat 1,15%.
	Persentase Penduduk berakses air minum layak dengan Target 60,26% pada tahun 2025, realisasi 60,19%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 99,88% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 64,33%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 60,19%, dengan persentase capaian 93,56%
5.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2024 adalah 53,19% menjadi 52,40% atau menurun 0,79%.
	Persentase Rumah tinggal bersanitasi layak dengan Target 53,55% pada tahun 2025, realisasi 52,40%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 97,85% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 55,37%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 52,40%, dengan persentase capaian 94,64%

SASARAN 3			: Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Hasil Analisis :

1.	Persentase Sampah yang tertangani pada tahun 2024 adalah 100% tidak mengalami perubahan pada tahun 2025 dengan angka 100%.
	Persentase sampah yang tertangani dengan Target 100% pada tahun 2025, realisasi 100%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 100%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 100%, dengan persentase capaian 100%

SASARAN 4			: Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	20,09	19,40	96,57	23,35	83,08

Hasil Analisis :

1.	Persentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik pada tahun 2024 adalah 19,36% menjadi 19,40% atau meningkat 0,04% pada tahun 2025.
	Persentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik dengan Target 20,09% pada tahun 2025, realisasi 19,40%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 96,57% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 23,35%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 19,40%, dengan persentase capaian 83,08%

SASARAN 5			Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,01	49,60	62,78	79,87	62,10
2.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi (166,22)	90,25	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	90,23

Hasil Analisis :

1.	Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 adalah 71,79 menjadi 49,60 atau menurun 22,19 pada tahun 2025.						
	Indeks kualitas lingkungan hidup dengan Target 79,01 pada tahun 2025, realisasi 49,60, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 62,78% (cukup berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 79,87, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 49,60, dengan persentase capaian 62,10%						
2.	Indeks resiko bencana pada tahun 2024 adalah 162,30 (resiko tinggi) menjadi 166,22 (resiko tinggi) atau meningkat 3,92 pada tahun 2025.						
	Indeks resiko bencana dengan Target (resiko tinggi) pada tahun 2025, realisasi 166,22 (resiko tinggi), pada tahun 2025 dengan persentase capaian 90,25% (berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah resiko sedang dengan nilai indeks (100 - 150), realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 166,22 (resiko tinggi), dengan persentase capaian 90,23%						
Misi 2			:	MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF			
SASARAN 6			:	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,33	7,33	100	7,93	92,43
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,63	12,63	100	12,68	99,61

Hasil Analisis :

1.	Angka rata - rata lama sekolah dengan satuan tahun pada tahun 2024 adalah 7,21 menjadi 7,33 atau meningkat 0,12 pada tahun 2025.						
	Angka rata - rata lama sekolah dengan Target 7,33 pada tahun 2025, realisasi 7,33, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 7,93, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 7,33, dengan persentase capaian 92,43%						
2.	Angka harapan lama sekolah dengan satuan tahun pada tahun 2024 adalah 12,62 menjadi 12,63 atau meningkat 0,01 pada tahun 2025.						
	Angka harapan lama sekolah dengan Target 12,63 pada tahun 2025, realisasi 12,63, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 12,68, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 12,63, dengan persentase capaian 99,61%						
SASARAN 7			:	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,37	67,73	94,90	72,12	93,91

Hasil Analisis :

1.	Angka usia harapan hidup dengan satuan tahun pada tahun 2024 adalah 71,22 menjadi 67,73 atau menurun 3,49 pada tahun 2025.
	Angka usia harapan hidup dengan Target 71,37 pada tahun 2025, realisasi 67,73, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 94,90% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 72,12, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 67,73, dengan persentase capaian 93,91%

SASARAN 8			:	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,22	96,04	99,81	97,52	98,48
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	53,73	52,73	98,14	59,73	88,28
3.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	47,00	58,69	124,87	57,00	102,96
4.	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	36,38	16,53	45,44	100	16,53

1.	Indeks pembangunan gender pada tahun 2024 adalah 95,96 menjadi 96,04 atau menurun 0,18 pada tahun 2025.
	Indeks pembangunan gender dengan Target 96,22 pada tahun 2025, realisasi 96,04, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 99,81% (berhasil)

	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 97,52, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 96,04, dengan persentase capaian 98,48%						
2.	Indeks pemberdayaan gender pada tahun 2024 adalah 52,73 tidak ada perubahan sampai tahun 2025 dan tetap pada poin 52,73.						
	Indeks pemberdayaan gender dengan Target 53,73 pada tahun 2025, realisasi 52,73, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 98,14% (berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 59,73, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 52,73, dengan persentase capaian 88,28%						
3.	Indeks perlindungan anak pada tahun 2024 adalah 45,00 menjadi 58,69 atau meningkat sebesar 13,69 pada tahun 2025.						
	Indeks perlindungan anak dengan Target 47,00 pada tahun 2025, realisasi 58,69, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 124,87% (sangat berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 57,00, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 58,69, dengan persentase capaian 102,96%						
4.	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi pada tahun 2024 adalah 23,69% menjadi 16,53% atau menurun 7,16% pada tahun 2025.						
	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi dengan Target 36,38% pada tahun 2025, realisasi 16,53%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 45,44% (tidak berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 100%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 16,53%, dengan persentase capaian 16,53%						
SASARAN 9			:	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase pemuda yang berprestasi	%	13,67	14,81	108,34	23,67	63

Hasil Analisis :

1.	Persentase pemuda yang berprestasi pada tahun 2024 adalah 23,69% menjadi 16,53% atau menurun 7,16% pada tahun 2025.						
	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi dengan Target 36,38% pada tahun 2025, realisasi 16,53%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 45,44% (tidak berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 100%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 16,53%, dengan persentase capaian 16,53%						
Misi 3			:	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL			
SASARAN 10			:	Peningkatan pendapatan masyarakat			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9

1.	PDRB perkapita	Rupiah	22.243.525	18916065	85,04	27.046.150	69,94
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63	3,570	73,67	2,62	73,39
3.	Inflasi	Nilai	0,01 - 2	1,77	100	0,01 - 2	100

Hasil Analisis :

1.	PDRB per kapita dengan satuan rupiah pada tahun 2024 adalah 21.283.000 menjadi 18.916.065 atau menurun 2.366.935 pada tahun 2025.
	PDRB per kapita dengan Target 22.243.525 pada tahun 2025, realisasi 18.916.065, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 85,04% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 27.046.150, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 18.916.065, dengan persentase capaian 69,94%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka dengan satuan persentase pada tahun 2024 adalah 2,63% menjadi 3,57% atau meningkat 0,94 pada tahun 2025.
	Tingkat pengangguran terbuka dengan Target 2,63% pada tahun 2025, realisasi 3,57%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 73,67% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 2,62%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 3,57, dengan persentase capaian 73,39%
3.	Inflasi dengan satuan nilai pada tahun 2024 adalah 0,02 menjadi 1,77 atau meningkat sebesar 1,75 pada tahun 2025.
	Inflasi dengan Target 0,01 - 2 pada tahun 2025, realisasi 1,77, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 0,01 - 2 , realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 1,77, dengan persentase capaian 100%

SASARAN 11			:	Meningkatnya ketahanan pangan			
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,23	56,47	83	74,28	76
2.	Pola Pangan Harapan	Skor	77,00	81,13	105,36	82,00	98,94

Hasil Analisis :

1.	Indeks ketahanan pangan pada tahun 2024 adalah 67,02 menjadi atau pada tahun 2025.
	Indeks ketahanan pangan dengan Target 68,23 pada tahun 2025, realisasi pada tahun 2025 dengan persentase capaian % (sangat berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 74,28, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak , dengan persentase capaian %
2.	Pola pangan harapan dengan satuan skor pada tahun 2024 adalah 75,9 menjadi 81,13 atau meningkat sebesar 5,23 pada tahun 2025.
	Pola pangan harapan dengan Target 77,00 pada tahun 2025, realisasi 81,13, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 105,36% (berhasil)

	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 82,00, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 81,13, dengan persentase capaian 98,94%						
<i>Misi 4</i>		:	MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN				
SASARAN 12		:					
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori	-	0,84	0,00	-	0

Hasil Analisis :

1.	Indeks kapasitas fiskal daerah dengan satuan kategori pada tahun 2025 adalah 0,836 (sangat rendah).
----	---

SASARAN 13		:	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	4,00	5,61	140,25	9,00	62,33

Hasil Analisis :

4.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah 3,32% menjadi 5,61% atau meningkat 2,29% pada tahun 2025.						
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan Target 4,00% pada tahun 2025, realisasi 5,61%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 140,25% (tidak berhasil)						
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebanyak 9,00%, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 5,61%, dengan persentase capaian 62,33%						

<i>Misi 5</i>		:	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
SASARAN 14		:	Peningkatan kualitas pelayanan publik				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks SPBE	Indeks	3,02	2,81	93,05	3,97	70,78
2.	Indeks INOVASI DAERAH	Indeks	47,69 (Inovatif)	43,11	90,39	91,69 (Sangat Inovatif)	47,01
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	44,32	56,82	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	72,84

Hasil Analisis :

1.	Indeks SPBE pada tahun 2024 adalah 2,83 menjadi 2,81 atau menurun sebesar 0,02 pada tahun 2025.
	Indeks SPBE dengan Target 3,02 pada tahun 2025, realisasi 2,81, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 93,05% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 3,97, realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 2,81, dengan persentase capaian 70,78%
2.	Indeks INOVASI daerah pada tahun 2024 adalah 36,69 (Inovatif) menjadi 43,11 atau meningkat sebesar 6,42 pada tahun 2025.
	Indeks INOVASI daerah dengan Target 47,69 (Inovatif) pada tahun 2025, realisasi 43,11, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 90,39% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 91,69 (Sangat Inovatif), realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 43,11, dengan persentase capaian 47,01%
3.	Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 adalah 82,87 menjadi 44,32 atau menurun sebesar 38,55 pada tahun 2025.
	Indeks kepuasan masyarakat dengan Target 78 - 87,99 (Kategori B Zona Hijau) pada tahun 2025, realisasi 44,32, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 56,82% (cukup berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebesar 78 - 87,99 (Kategori B Zona Hijau), realisasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 44,32, dengan persentase capaian 72,84%

SASARAN 15			: Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	CC	140	B	95,24

Hasil Analisis :

1.	Indeks Reformasi Birokrasi dengan satuan kategori pada tahun 2024 adalah C menjadi CC atau terkategori meningkat pada tahun 2025.
	Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target C pada tahun 2025, realisasi CC, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 140% (sangat berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah B, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah CC, dengan persentase capaian 95,24%

SASARAN 16			: Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	100	BB	87,84

2.	Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	100	WTP	100,00
3.	Capaian penilaian SPM	Skor	100,00	99,41	99,41	100,00	99,41

Hasil Analisis :	
1.	Nilai Capaian SAKIP dengan satuan kategori pada tahun 2024 adalah B tidak ada perubahan dan tetap terkategori B pada tahun 2025.
	Nilai Capaian SAKIP dengan Target B pada tahun 2025, realisasi B, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah BB, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah B, dengan persentase capaian 87,84%
2.	Opini BPK atas laporan keuangan dengan satuan kategori pada tahun 2024 adalah WTP tidak ada perubahan pada tahun 2025 dan tetap terkategori WTP.
	Opini BPK atas laporan keuangan dengan Target WTP pada tahun 2025, realisasi WTP, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah WTP, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah WTP, dengan persentase capaian 100%
3.	Capaian penilaian SPM dengan satuan skor pada tahun 2024 adalah 92,86 menjadi 99,41 pada tahun 2025.
	Capaian penilaian SPM dengan Target 100 pada tahun 2025, realisasi 99,41, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 99,41% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 100, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 99,41, dengan persentase capaian 99,41%

SASARAN 17		:	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Nilai Capaian Kinerja LPPD	Kategori	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	-	0	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	0
2.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80,00	98,18	122,73	90,00	109,09
3.	Indeks kematangan organisasi	indeks	28,30	28,30	100	40,00	70,75

Hasil Analisis :	
1.	Nilai Capaian kinerja LPPD dengan satuan kategori pada tahun 2024 adalah rendah (2,26 - 2,75) .
	Nilai Capaian kinerja LPPD dengan Target rendah (2,26 - 2,75) pada tahun 2025 dan realisasi pada tahun 2025 belum dirilis.

	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah sedang (2,76 - 3,25) dan realisasi sampai dengan tahun 2025 belum dirilis.
2.	Indeks Reformasi hukum dengan satuan angka pada tahun 2024 adalah 78 menjadi 98,18 atau meningkat 20,18 pada tahun 2025.
	Indeks Reformasi hukum dengan Target 80 pada tahun 2025, realisasi 98,18, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 122,73% (sangat berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 90,00, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 98,18, dengan persentase capaian 109,09%
3.	Indeks kematangan organisasi pada tahun 2024 adalah 28,1 menjadi 28,30 atau meningkat pada tahun 2025.
	Indeks kematangan organisasi dengan Target 28,30 pada tahun 2025, realisasi 28,30, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 100% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 40,00, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 28,30, dengan persentase capaian 70,75%

<i>Misi 6</i>		:	MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING				
SASARAN 18		:	Penurunan angka kemiskinan				
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Angka Kemiskinan	%	23,98	24,50	97,88	20,48	83,59
2.	Rasio Gini	Rasio	0,2-0,3	0,31	96,00	0,2 – 0,3	96,00

Hasil Analisis :

1.	Angka kemiskinan dengan satuan persentase pada tahun 2024 adalah 24,68% menjadi 24,50% atau menurun sebesar 18% pada tahun 2025.
	Angka kemiskinan dengan Target 23,98% pada tahun 2025, realisasi 24,50%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 97,88% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 20,48%, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 24,50%, dengan persentase capaian 83,59%
2.	Rasio gini pada tahun 2024 adalah 0,28 menjadi 0,31 atau meningkat sebesar 0,03 pada tahun 2025.
	Rasio gini dengan Target 0,2 - 0,3 pada tahun 2025, realisasi 0,31, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 96,00% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 0,2 - 0,3%, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 0,31%, dengan persentase capaian 96,00%

SASARAN 19	:	Penurunan prevalensi stunting
-------------------	---	--------------------------------------

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Target RPJMD s/d 2030	% capaian target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase balita gizi buruk	%	13,0	6,30	206,35	11,5	182,54
2.	Prevalensi balita gizi kurang	%	31,3	26,90	116,36	27,9	96,42
3.	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	55,0	-	0	80,0	0,00

Hasil Analisis :

1.	Persentase balita gizi buruk pada tahun 2024 adalah 15,9% menjadi 6,30% atau menurun sebesar 9,60% pada tahun 2025.
	Persentase balita gizi buruk dengan Target 13,0% pada tahun 2025, realisasi 6,30%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 206,35% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 11,5%, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 6,30%, dengan persentase capaian 182,54%
2.	Prevalensi balita gizi kurang dengan satuan persentase pada tahun 2024 adalah 34% menjadi 26,90% atau menurun sebesar 7,1% pada tahun 2025.
	Prevalensi balita gizi kurang dengan Target 31,3% pada tahun 2025, realisasi 26,90%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 116,36% (sangat berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 27,9%, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 26,90%, dengan persentase capaian 96,42%
3.	Indeks kesejahteraan sosial dengan satuan persentase pada tahun 2024 adalah 24,68% menjadi 24,50% atau menurun sebesar 18% pada tahun 2025.
	Angka kemiskinan dengan Target 23,98% pada tahun 2025, realisasi 24,50%, pada tahun 2025 dengan persentase capaian 97,88% (berhasil)
	Target RPJMD sampai dengan tahun 2030 adalah 20,48%, realisasi sampai dengan tahun 2025 adalah 24,50%, dengan persentase capaian 83,59%

B. CAPAIAN MISI- MISI IKU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 2025 - 2029

capaian masing-masing misi RPJMD (tahun pertama) dapat digambarkan sebagi berikut :

Misi 1

Capaian misi 1 yaitu " Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur ramah lingkungan " dengan predikat berhasil (86,78%) adalah merupakan akumulasi dari capaian 5 (lima) sasaran namun masih terdapat 1 sasaran dengan predikat kurang berhasil dan 1 sasaran dengan predikat cukup berhasil yang disebabkan beberapa hal antara lain :

1. terdapat 3 (tiga) sasaran dengan predikat **berhasil** yaitu :
- Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak

- Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik

- Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat
2. Terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **cukup berhasil** yaitu :
- Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi
3. Terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **kurang berhasil** yaitu :
- Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim

capaian misi 1 (satu) berhasil, namun masih terdapat 2 (dua) sasaran dengan predikat kurang berhasil dan cukup berhasil antara lain:

Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi yang disebabkan oleh :

1. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan;
2. Instansi Pemerintah masih mengalami kekurangan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
3. Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sarana prasarana infrastruktur (Jalan, jembatan dan jaringan internet) sangat terbatas pada tahun 2025;
4. Topografi berbukit dan terpencil, dalam hal ini banyak desa berada diwilayah pegunungan sehingga akses transportasi (jalan dan jaringan) sulit untuk dikembangkan;
5. Partisipasi masyarakat rendah dalam perencanaan, sehingga fasilitas yang dibangun tidak selalu sesuai kebutuhan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

1. Integrasi lintas sektor melalui forum koordinasi rutin;
2. Mencari pendanaan alternatif contohnya kerjasama swasta, BUMN, CSR;
3. Pelatihan teknis dan manajerial bagi aparat pelaksana;
4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk mendukung transformasi digital.

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh :

1. Kebijakan daerah belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan nasional terkait adaptasi iklim;
2. Program masih bersifat sektoral, belum terintegrasi lintas bidang (pertanian, kehutanan, energi, kesehatan);
3. Alokasi dana terbatas untuk program lingkungan dan adaptasi iklim;
4. Infrastruktur hijau (ruang terbuka, sistem drainase, energi terbarukan) belum memadai;
5. Kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah;
6. Perubahan iklim ekstrem (banjir, kekeringan, badai) memperburuk kondisi lingkungan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

1. Menyusun indikator adaptasi iklim yang jelas dan terukur;
2. Pemetaan wilayah rawan iklim untuk prioritas program;
3. Prioritaskan program dengan dampak langsung terhadap adaptasi iklim (misalnya konservasi air, penghijauan);
4. Mencari pendanaan alternatif melalui kerjasama swasta, donor, dan CSR;
5. Pembangunan ruang terbuka hijau, sistem drainase adaptif, dan energi terbarukan;
6. Pelatihan teknis bagi aparat dan masyarakat tentang adaptasi iklim;
7. Sosialisasi perilaku ramah lingkungan (reduce, reuse, recycle).

Capaian misi 1 (satu) berhasil dengan 3 (tiga) sasaran yang terkategori berhasil yaitu :

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak :

1. Sinkronisasi lintas sektor (PU, Perumahan, ESDM, Kesehatan, Bappeda);
2. Adanya regulasi daerah yang mendukung program perumahan, listrik, air, dan sanitasi;

3. Alokasi anggaran memadai dan tepat sasaran;
4. Pembangunan jaringan listrik, air bersih dan sanitasi sesuai kondisi geografis;
5. Koordinasi antar instansi berjalan efektif;
6. Swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni;
7. Edukasi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi risiko lingkungan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Pembangunan sumur bor, jaringan pipa sederhana, dan septic tank sehat;
2. Sosialisasi PHBS dan sanitasi sehat;
3. Perluasan jaringan listrik desa dengan energi terbarukan;
4. Pelatihan teknis bagi aparat dan masyarakat;
5. Penguatan kelembagaan daerah untuk keberlanjutan program;
6. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) secara berkelanjutan.

Faktor - faktor keberhasilan peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik :

1. Adanya regulasi daerah yang jelas tentang pengelolaan sampah dan limbah;
2. Integrasi kebijakan lintas sektor (lingkungan Hidup, Kesehatan, PUPR, PRKP);
3. Alokasi anggaran memadai untuk sarana prasarana pengelolaan sampah;
4. Tersedianya sarana pengangkutan, TPS, TPA, dan fasilitas pengolahan limbah;
5. Aparat pelaksana memiliki kapasitas teknis dan manajerial;
6. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah;
7. Perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Penyediaan sarana pengangkutan dan TPS yang memadai;
2. Sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga;
3. Pelatihan teknis bagi aparat dan masyarakat;
4. Integrasi program pengelolaan sampah dengan sektor lain (pertanian, energi);

5. Pembangunan TPA modern berbasis sanitary landfill;
6. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) secara berkelanjutan.

Faktor - faktor keberhasilan peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat :

1. Adanya kebijakan daerah dan nasional yang mendukung rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi;
2. Integrasi lintas sektor (PU, Pertanian);
3. Alokasi anggaran memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
4. Ketersediaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang terpelihara baik;
5. Aparat pelaksana dan kelompok tani memiliki kapasitas teknis dalam pengelolaan irigasi;
6. Koordinasi antar instansi berjalan efektif;
7. Keterlibatan aktif petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi;
8. Swadaya masyarakat dalam menjaga saluran irigasi;
9. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait ketahanan pangan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Identifikasi jaringan irigasi yang rusak dan segera dilakukan rehabilitasi;
2. Sosialisasi kepada petani tentang pemeliharaan irigasi;
3. Monitoring rutin distribusi air;
4. Pembangunan jaringan irigasi baru di wilayah prioritas;
5. Kolaborasi dengan swasta untuk pendanaan dan teknologi;
6. Pencapaian akses irigasi merata untuk seluruh lahan pertanian produktif;
7. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk ketahanan pangan jangka panjang.

Misi 2

Capaian misi 2 yaitu " **Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akselerasi yang inklusif** ", predikat sangat berhasil dengan capaian (109,91%) merupakan akumulasi dari capaian 4 (empat) sasaran dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. terdapat 2 (dua) sasaran dengan predikat **sangat berhasil** yaitu :
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

- Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.

1. terdapat 2 (dua) sasaran dengan predikat **berhasil** yaitu :

- Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
- Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas

capaian misi 2 (dua) sangat berhasil, dengan 2 (dua) sasaran yang berpredikat sangat berhasil yaitu :

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Adanya kebijakan daerah/nasional yang mendukung program kesehatan masyarakat;
2. Integrasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial);
3. Alokasi anggaran memadai untuk layanan kesehatan dasar dan promotif-preventif;
4. Dukungan pendanaan alternatif (CSR, donor, program nasional);
5. Ketersediaan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, posyandu);
6. Sarana air bersih, sanitasi, dan lingkungan sehat mendukung kesehatan masyarakat;
7. Koordinasi antar instansi berjalan efektif;
8. Swadaya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
9. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait kesehatan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Sosialisasi PHBS dan gizi seimbang;
2. Rehabilitasi sarana kesehatan yang rusak;
3. Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah prioritas;
4. Pencapaian universal health coverage (akses layanan kesehatan merata);
5. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk kesehatan berkelanjutan.

Faktor - faktor keberhasilan peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni adalah :

1. Dukungan pendanaan alternatif (CSR, swasta, donor, program nasional);
2. Sarana olahraga yang memadai dan terpelihara;
3. Koordinasi antar instansi berjalan efektif;

4. Adanya kelembagaan pemuda (karang taruna, komunitas kreatif, organisasi olahraga/seni);

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Kompetisi olahraga dan seni tingkat lokal;
2. Pelatihan teknis singkat (soft skills, digital skills, kewirausahaan);
3. Kolaborasi dengan swasta untuk dukungan fasilitas dan pendanaan;
4. Penerapan sistem pengembangan pemuda berbasis komunitas dan teknologi;
5. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pembangunan pemuda berkelanjutan.

Adapun 2 (dua) sasaran dengan predikat berhasil yaitu :

Faktor - faktor keberhasilan sasaran peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah antara lain :

1. Kurikulum pendidikan yang menekankan keseimbangan antara aspek akademik, karakter, dan keterampilan hidup;
2. Integrasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, budaya);
3. Alokasi anggaran memadai untuk sarana pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pengembangan karakter;
4. Tersedianya sarana belajar yang layak (kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang seni/olahraga);
5. Akses teknologi pendidikan (internet, perangkat digital);
6. Lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan mendukung pembentukan karakter;
7. Guru dan tenaga pendidik yang kompeten dalam mengajar sekaligus membina karakter;
8. Adanya kelembagaan pendukung (komite sekolah, organisasi siswa, komunitas literasi);
9. Keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak;
10. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait pendidikan karakter.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Sosialisasi program literasi dan pendidikan karakter di sekolah;
2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler (seni, olahraga, organisasi siswa);
3. Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis karakter;
4. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan (perpustakaan, laboratorium, ruang seni/olahraga);
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran interaktif;

6. Program parenting untuk meningkatkan peran orang tua;
7. Pencapaian akses pendidikan berkualitas merata untuk semua anak usia sekolah;
8. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pendidikan berkelanjutan.

Faktor - faktor keberhasilan sasaran peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas antara lain :

1. Adanya regulasi daerah/nasional yang mendukung pemenuhan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
2. Integrasi lintas sektor (sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, tenaga kerja);
3. Alokasi anggaran memadai untuk program perlindungan dan pemberdayaan;
4. Akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang setara;
5. Koordinasi antar instansi berjalan efektif;
6. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak perempuan, anak, dan disabilitas;
7. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait perlindungan kelompok rentan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Sosialisasi hak perempuan, anak, dan disabilitas di sekolah, komunitas, dan media;
2. Pembangunan fasilitas publik inklusif (transportasi, sekolah, kantor layanan);
3. Program pemberdayaan ekonomi perempuan dan disabilitas (pelatihan, akses modal);
4. Penguatan kelembagaan daerah agar mandiri dan berkelanjutan;
5. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk kesetaraan dan inklusi sosial.

Misi 3

Capaian misi 3 yaitu "**Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal**" dengan predikat berhasil (90,2%) merupakan akumulasi dari capaian 2 (dua) sasaran dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. terdapat 2 (dua) sasaran dengan predikat berhasil yaitu :
 - Peningkatan pendapatan masyarakat
 - Meningkatnya ketahanan pangan

capaian misi 3 (tiga) berhasil, dengan 2 (dua) sasaran mencapai predikat berhasil antara lain :

Faktor - faktor keberhasilan dari sasaran peningkatan pendapatan masyarakat adalah :

1. Integrasi lintas sektor (pertanian, perdagangan, pariwisata, UMKM, investasi);
2. Akses masyarakat terhadap permodalan (bank, koperasi, kredit mikro);
3. Alokasi anggaran memadai untuk program pemberdayaan ekonomi;
4. Ketersediaan sarana transportasi, pasar, dan jaringan distribusi;
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk (e-commerce, marketplace);
6. Infrastruktur energi dan irigasi yang mendukung produktivitas;
7. Adanya kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi, kelompok usaha bersama);
8. Dukungan komunitas dalam pengembangan UMKM dan usaha lokal;
9. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait ekonomi.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi masyarakat;
2. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit mikro dan koperasi;
3. Peningkatan akses pasar lokal dan digital;
4. Pembangunan pusat UMKM dan inkubasi usaha;
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi produk;
6. Diversifikasi usaha masyarakat (pertanian, pariwisata, industri kreatif);
7. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas dan teknologi;
8. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat agar mandiri dan berkelanjutan;
9. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pembangunan ekonomi

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya ketahanan pangan antara lain :

1. Adanya kebijakan daerah/nasional yang mendukung ketahanan pangan;
2. Alokasi anggaran memadai untuk program pertanian dan pangan;
3. Akses petani terhadap permodalan (kredit usaha tani, koperasi);
4. Ketersediaan jaringan irigasi, gudang, pasar, dan transportasi;
5. Sistem distribusi pangan yang efisien dan terintegrasi;
6. Adanya kelembagaan ekonomi masyarakat (kelompok tani, koperasi pangan);
7. Keterlibatan aktif masyarakat dalam produksi dan konsumsi pangan lokal;
8. Antisipasi terhadap perubahan iklim, bencana, dan fluktuasi harga;
9. Adaptasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait ketahanan pangan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Peningkatan produksi pangan lokal melalui benih unggul dan pupuk tepat guna;
2. Sosialisasi diversifikasi pangan dan pola konsumsi sehat;
3. Rehabilitasi jaringan irigasi dan sarana distribusi;
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian dan distribusi pangan;
5. Pelatihan teknis bagi petani dan pelaku usaha pangan;
6. Pencapaian akses pangan berkualitas merata untuk seluruh masyarakat;
7. Penerapan sistem pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan komunitas;
8. Penguatan kelembagaan pangan daerah agar mandiri dan berkelanjutan;
9. Kolaborasi multi-sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk ketahanan pangan berkelanjutan.

Misi 4

Capaian misi 4 yaitu "**Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan**" dengan predikat sangat berhasil (140,25%) merupakan akumulasi dari capaian 1 (satu) sasaran dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **sangat berhasil** yaitu:
 - Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber - sumber PAD

capaian misi 4 (empat) sangat berhasil dengan 1 (satu) capaian sasaran yang berpredikat sangat berhasil yaitu :

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber - sumber PAD antara lain :

1. Peraturan daerah yang jelas, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Kepastian hukum bagi wajib pajak/retribusi;
3. Pemanfaatan aset daerah secara produktif (tanah, bangunan, BUMD);
4. Identifikasi sektor unggulan (pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa);
5. Aparatur yang profesional, berintegritas, dan paham teknologi;
6. Unit pengelola PAD yang kuat dan responsif;
7. Sosialisasi manfaat PAD bagi pembangunan.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Mengembangkan pajak/retribusi baru sesuai potensi lokal;
2. Implementasi aplikasi pembayaran online, integrasi dengan perbankan;
3. Insentif bagi wajib pajak patuh, sanksi bagi pelanggan;
4. Integrasi program PAD dengan sektor lain (pariwisata, perdagangan, investasi).

Misi 5

Capaian misi 5 (lima) yaitu "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**" dengan predikat berhasil (88,53%) merupakan akumulasi dari capaian 4 (empat) sasaran dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. terdapat 3 (tiga) sasaran dengan predikat **berhasil** yaitu:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan

2. terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **cukup berhasil** yaitu :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah

Capaian misi 5 (lima) berhasil, dengan 3 (tiga) sasaran yang berpredikat berhasil antara lain :

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Regulasi yang jelas dan konsisten untuk standar pelayanan;
2. Aparatur yang kompeten, berintegritas, dan responsif;
3. SOP pelayanan yang sederhana, jelas, dan terukur;
4. Mekanisme umpan balik (survey kepuasan, kanal pengaduan);
5. Publikasi standar pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Pengembangan aplikasi terpadu untuk layanan administrasi, perizinan, dan pengaduan;
2. Audit internal, evaluasi berkala, dan integrasi dengan SAKIP;
3. Audit internal, evaluasi berkala, dan integrasi dengan SAKIP;
4. Evaluasi rutin terhadap kualitas layanan dengan indikator kepuasan;
5. Integrasi pelayanan dengan sektor kesehatan, pendidikan, investasi, dan sosial;

6. Penghargaan bagi unit dengan pelayanan terbaik, sanksi bagi yang tidak memenuhi standar.

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :

1. Dukungan penuh kepala daerah dan pimpinan OPD terhadap agenda RB;
2. Roadmap RB yang terukur dan sesuai dengan kebijakan nasional;
3. Peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan RB;
4. Aparatur yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan;

5. Integrasi data antar unit kerja;
6. Penggunaan SAKIP untuk mengukur kinerja birokrasi;
7. Evaluasi rutin dengan indikator input-proses-output-outcome;

8. Penerapan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK).

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Penguatan roadmap RB atau Menyusun rencana jangka menengah dan panjang dengan target jelas;
2. Pelatihan pelayanan prima, manajemen perubahan, dan literasi digital;
3. Mendorong OPD membangun WBK/WBBM;
4. Evaluasi rutin terhadap kualitas layanan dan capaian RB;
5. Menerapkan sistem reward & punishment.

Faktor -faktor keberhasilan capaian sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan adalah :

1. Dukungan kepala daerah terhadap penerapan akuntabilitas;
2. Regulasi yang jelas terkait pelaporan kinerja dan keuangan;
3. Penyusunan indikator kinerja yang cukup terukur;
4. Audit internal yang rutin dan independen;
5. Aparatur yang kompeten dalam manajemen keuangan dan kinerja;
6. Digitalisasi sistem keuangan dan kinerja (e-budgeting, e-performance).

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Audit rutin, pengawasan melekat, dan tindak lanjut rekomendasi BPK;
2. Pelatihan akuntansi pemerintahan, manajemen kinerja, dan integritas;
3. Menetapkan indikator capaian akuntabilitas (rasio belanja publik, ketepatan laporan, opini BPK);

4. Penghargaan bagi unit dengan laporan akuntabel, sanksi bagi yang lalai.

Adapun capaian sasaran pada misi 5 (lima) dengan predikat cukup berhasil yaitu :
Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebabkan oleh :

1. RPJMD, Renstra, dan program sektoral tidak sinkron;
2. Indikator kinerja tidak jelas atau sulit diukur;
3. Infrastruktur digital dan fisik belum memadai;
4. Struktur organisasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Sinergi antar-OPD dalam pelaksanaan program;
6. Integrasi data antar unit kerja untuk efisiensi dan transparansi;
7. Evaluasi rutin untuk memastikan capaian sesuai target.

Berikut beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan capaian :

1. Menyusun perencanaan berbasis data dan indikator kinerja;
2. Pelatihan manajemen pemerintahan, pelayanan publik, dan literasi digital;
3. Forum koordinasi rutin untuk sinkronisasi program;
4. Evaluasi rutin terhadap kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
5. Penghargaan bagi unit berprestasi, sanksi bagi yang lalai.

Misi 6

Capaian misi 6 (enam) yaitu "**Mendorong percepatan transformasi sosial melalui pengentasan kemiskinan dan stunting**" dengan predikat sangat berhasil (102,25%) merupakan akumulasi dari capaian 2 (dua) sasaran dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **sangat berhasil** yaitu:
 - Penurunan prevalensi stunting
2. terdapat 1 (satu) sasaran dengan predikat **berhasil** yaitu :
 - Penurunan angka kemiskinan

Capaian misi 6 (enam) predikat berhasil, dengan 1 (satu) sasaran berpredikat sangat berhasil yaitu :

Faktor - faktor keberhasilan capaian sasaran penurunan prevalensi stunting adalah :

1. Dukungan kepala daerah dan OPD terkait terhadap program percepatan penurunan stunting;
2. Intervensi gizi spesifik: pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi, vitamin, dan ASI eksklusif;
3. Intervensi gizi sensitif: sanitasi, air bersih, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga;
4. Sinergi antara dinas kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, nakeswan, perikanan dan P2KB;
5. Kolaborasi dengan desa, PKK, kader posyandu, dan lembaga non-pemerintah;
6. Tenaga kesehatan, kader posyandu, dan aparat desa yang terlatih;
7. Kelembagaan yang responsif dan mampu mengintegrasikan program;
8. Evaluasi rutin untuk mengukur capaian dan memperbaiki intervensi;
9. Edukasi keluarga tentang pola asuh, gizi seimbang, dan sanitasi.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Integrasi program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga;
2. Pelatihan tenaga kesehatan, kader, dan aparat desa.
3. Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan ketahanan pangan;
4. Edukasi gizi, sanitasi, dan pola asuh melalui media dan tokoh masyarakat;
5. Penghargaan bagi desa/OPD dengan capaian terbaik, sanksi bagi yang lalai.

Adapun 1 (satu) sasaran dengan predikat berhasil antara lain :

Faktor - faktor keberhasilan lcapaian sasaran penurunan angka kemiskinan antara lain :

1. Dukungan kepala daerah terhadap program pengentasan kemiskinan;
2. Kebijakan yang konsisten dan terintegrasi dengan program nasional;
3. Penetapan indikator kemiskinan yang terukur (pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, perumahan);
4. Sinergi antara dinas sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan tenaga kerja;

5. Kolaborasi dengan desa, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha;
6. Program UMKM, akses permodalan, dan peningkatan keterampilan kerja;
7. Penguatan sektor unggulan lokal (pertanian, pariwisata, perdagangan);
8. Bantuan sosial tepat sasaran (PKH, BPNT, BLT);
9. Jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin;
10. Pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan internet;
11. Evaluasi rutin untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun upaya yang ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Menyatukan program lintas sektor dalam satu kerangka kerja;
2. Dukungan UMKM, koperasi, dan sektor unggulan daerah;
3. Pelatihan keterampilan kerja dan literasi keuangan;
4. Bantuan sosial adaptif sesuai kondisi ekonomi;
5. Program pemberdayaan berbasis komunitas dan CSR.



BAB IV PENUTUP

TAHUN 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan 2 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra Perubahan Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Dari 18 (delapan belas) sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan berdasarkan perhitungan pencapaian misi-misi RPJMD sesuai indikator RPJMD dapat disimpulkan bahwa capaian RPJMD 2025-2029 Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2025 sebesar **102,98%** dengan sebutan "**sangat berhasil**".

Faktor-faktor yang mempengaruhi/menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Tersedianya dana dari berbagai sumber.

Tersedianya sumber daya aparatur yang relatif memadai (baik kuantitas maupun kualitas).

Tersedianya prasarana dan sarana yang relatif memadai.

Adanya kebijakan yang relevan dengan kondisi /isu yang berkembang dalam masyarakat.

Tersedianya pedoman pelaksanaan tugas.

Adanya kerja sama dengan berbagai pihak.

Adanya dukungan / partisipasi dari *stakeholders*, lembaga-lembaga kemitraan, swasta dan masyarakat.

Adanya mekanisme kerja yang relatif tepat.

Iklim politik dan Kamtibmas yang relatif kondusif.

Walaupun capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, namun masih dijumpai hambatan/ kendala/ masalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya distribusi / pembagian tugas , fungsi dan personil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Struktur Jabatan yang telah ditetapkan, mengakibatkan kelambanan dalam penyelesaian tugas jabatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur, mengakibatkan rendah pula kualitas perencanaan dan pelaksanaan tugas serta hasil kerja.
3. Masih rendahnya disiplin, budaya kerja dan etos kerja, mengakibatkan kurangnya produktivitas kerja.

4. Kurangnya koordinasi dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja, belum tersusunnya Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur menimbulkan kurang jelasnya rencana kinerja yang berorientasi pada hasil yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran.
5. Belum mantapnya Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja, indikator sasaran sektor – sektor khususnya dalam memperhitungkan kekuatan dan kelemahan untuk memprediksikan target yang akan dicapai, ini disebabkan target yang ditetapkan lebih kecil sehingga mempengaruhi persentase capaian.
6. Belum termanfaatkannya seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi yang telah disusun untuk mengendalikan pelaksanaan program / kegiatan.
7. Pelayanan kemasyarakatan belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran karena masih dihadapkan pada keterbatasan dana, prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah.
8. *Human relation* dan materi informasi belum mencerminkan solusi atas kebutuhan informasi bagi publik, menyebabkan kurangnya komunikasi yang berdampak pada lambannya tataran roda pembangunan.
9. Belum terwujudnya pemerataan dan keseimbangan kepemilikan dan pengembangan prasarana dan sarana bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, menimbulkan kelambanan penyelesaian tugas pada beberapa satuan Kerja.
10. Kondisi sosial budaya (adat/tradisi/mitos) yang tidak kondusif, mengurangi minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya dalam pengelolaan berbagai sumber daya potensial.
11. Belum konsistensinya Perangkat Daerah dalam penyediaan data perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.
12. *Refocusing* dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2025. *Refocusing* dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim yang mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala.
13. Kondisi keuangan daerah tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat, termasuk transfer daerah lainnya serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hambatan/kendala/masalah di atas dapat diatasi melalui strategi pemecahan sebagai berikut :

Dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara berkala.

Melaksanakan pengawasan teknis dan administratif secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Melakukan perubahan kebijakan dalam aspek personalia dan anggaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang berkembang.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya pimpinan Perangkat Daerah telah mengambil langkah-langkah penugasan kepada Pejabat/Staf lain untuk menangani tugas-tugas pada Jabatan-jabatan yang lowong.

Dilakukan upaya peningkatan disiplin, budaya kerja dan etos kerja melalui pengecekan kehadiran Pegawai dalam apel dan Inspeksi mendadak di ruang kerja Perangkat Daerah.

Dilakukan perbaikan terhadap sebagian kecil Dokumen Rencana Kinerja khususnya pada formulasi Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Sasaran.

Dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam melaksanakan program dan kegiatan di segala bidang.

Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrim. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,

Berdasarkan hambatan/kendala/masalah yang dijumpai dalam proses pencapaian sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal pokok sebagai langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam rangka mencegah hambatan/kendala/masalah yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

Melakukan pembinaan dan arahan umum tentang SAKIP bagi Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan pemahaman, sekaligus membangun komitmen untuk mengimplementasikan SAKIP tersebut secara benar dan bertanggung jawab.

Melaksanakan Bimbingan akan implemetasi SAKIP (lanjutan) bagi Pimpinan Perangkat Daerah, Kasubbag yang menangani Program dan Staf Pelaksana SAKIP untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman tentang SAKIP dan implementasinya secara benar dan bertanggung jawab, termasuk pengetahuan tentang sistem - sistem lain yang berkaitan seperti Sistem Informasi Data Kinerja, Manual Pengolahan Data Kinerja dan Pemutakhiran Data Kinerja secara periodik.

Menyusun SP (Standar Pelayanan) untuk beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sebagai metode pelayanan publik untuk menunjang pencapaian kinerja.

Menyusun SOP (*Standart Operating Procedure*) untuk beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan kepada masyarakat yang akan menerima pelayanan.

Menerapkan Sistem AKIP sebagai bagian dari manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara sungguh-sungguh dan selalu mengikuti pengembangannya.

Menyusun Rencana Kinerja secara sinergis berdasarkan Rencana Strategis dengan menggunakan pendekatan sehingga dapat diidentifikasi kegiatan-kegiatan dari Satuan Kerja terkait yang perlu dilakukan secara terpadu untuk mencapai sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan.

Menyusun mekanisme perencanaan secara komprehensif dan baku dengan *time schedule* yang jelas, agar terwujud konsistensi antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain, tidak tumpang tindih dan ditetapkan tepat waktu.

Penyusunan Pedoman Implementasi SAKIP di Kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014.

Melakukan revisi dokumen RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kinerja untuk mereformulasikan komponen-komponen yang terdapat dalam dua dokumen tersebut agar sesuai dengan kebutuhan/isu aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Menggunakan Rencana Kinerja dan mengupayakan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya, penyusunan anggaran dan diintegrasikan dalam proses monitoring dan evaluasi serta dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta mengisi personil-personil selengkapnyanya pada struktur organisasi yang telah dibentuk, agar tidak terjadi kevakuman jabatan/kepincangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Melakukan revisi rumusan tugas pokok dan fungsi serta peran jabatan struktural agar lebih efektif dan efisien pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Struktural dan Diklat Teknis Fungsional secara bertahap melalui perencanaan yang dilakukan secara cermat dan saksama.

Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur melalui revitalisasi P3 Waskat dan Budaya Kerja untuk meningkatkan produktifitas kerja.

Menindaklanjuti hasil pemetaan / pengkajian potensi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah, agar dapat membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan

dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung.

Memusatkan pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana untuk mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pemilikan prasarana dan sarana, termasuk prasarana dan sarana produksi bagi Perangkat Daerah demi terwujudnya keserasian dan kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan produksi dari berbagai bidang.

Meningkatkan kesadaran dan kemampuan Sumber Daya Masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan melalui penyuluhan secara berkala dan pelatihan teknis di segala bidang secara bertahap.

Menempatkan personil yang memiliki kapabilitas dan mengembangkan manajemen usaha pada BUMD, agar dapat mengelola Perusahaan Daerah kearah kemajuan yang signifikan.

Menetapkan formasi pengadaan Pegawai lebih banyak bagi Tenaga Guru dan Kesehatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.

Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Pendidikan dan Kesehatan secara bertahap hingga menjangkau pelosok desa.

Menyederhanakan sistem penyusunan dan pembahasan anggaran lingkup Eksekutif agar tidak berbelit-belit hingga pembahasan dan penetapan dilingkup Legeslatif tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan direncanakan dapat diselesaikan dalam tahun yang bersangkutan dan/atau tidak terbawa ke tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LARIP) Tahun 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan ini dibuat dengan harapan dapat diterima sebagaimana adanya dan dioergunakan sebagaimana mestinya.



17 Maret 2026
Bupati Timor Tengah Selatan,

Edward Markus Lioe

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			2025
1	2	3	6
1.	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	53,07
		persentase jembatan dalam kondisi baik.	0
		Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	9,76
		Persentase jaringan internet yang dapat diakses	52
2.	Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	Persentase rumah layak huni	54,70
		Persentase rumah korban bencana yang dibangun	100
		Rasio Elektrifikasi	87,67
		Persentase penduduk berakses air minum layak	59,04
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	53,19
3.	Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	Persentase sampah yang tertangani	100
4.	Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	20,09
5.	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,01
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Risiko Tinggi
6.	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	7,33

		Harapan lama sekolah	12,63
7.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,37
8.	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Gender	96,22
		Indeks Pemberdayaan Gender	53,73
		Indeks Perlindungan Anak	47,00
		Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	36,38
9.	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.	Persentase pemuda yang berprestasi	13,67
10.	Peningkatan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita	22.243.525
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3
		Inflasi	0,01 - 2
11.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	68,23
		Pola Pangan Harapan	77
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,00
12.	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	4
13.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	3,02
		Indeks INOVASI DAerah	47,69 (Inovatif)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78-87,99 (Katgegori B Zona Hijau)
14.	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	C
15	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai capaian SAKIP	B

		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Capaian penilaian SPM	100,00
16.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	Nilai Capaian Kinerja LPPD	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)
		Indeks Reformasi Hukum	80,00
		Indeks kematangan organisasi	28,30
17.	Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	23,98
18.	Penurunan prevalensi stunting	Persentase balita gizi buruk	13
		Prevalensi balita gizi kurang	31,3
		Indeks Kesejahteraan Sosial	55

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 1.515.498.660
2.	Program informasi dan komunikasi publik	Rp. 0
3.	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.081.763.860
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.0
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 14.586.068.232
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 8.457.994.720
7.	Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 0
8.	Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.0
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 0
10.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 0

11.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 123.611.140.682
12.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 43.577.964.500
13.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 438.847.650
14.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 0
15.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 0
16.	Program Pengeembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.387.068.000
17.	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian; Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; Program pengelolaan perikanan Tangkap; Program Perikanan Budidaya	Rp. 2.975.834.250
18.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 1.553.307.000
19.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.0
20.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.450.085.432
21.	Program Aplikasi Informatika	Rp.0
22.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp.0
23.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 86.232.693.276
24.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 76.898.000
25.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp.0
26.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.0

27.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasanara Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	Rp. 9.860.000.000
28.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah; Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengelolaan Pendidikan; Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Rp.0
29.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Program Pengawasan Keamanan Keamanan Pangan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Pendidikan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	



LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2025

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	FORMULASI/DEFENISI OPERASIONAL	OPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
					2025	2025	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 1 : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN											
1.	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,91	53,07	41,93	79	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jaringan Jalan) × 100%	PUPR	PUPR	
		persentase jembatan dalam kondisi baik.	%			72,73	72,73	$\frac{\text{jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{jumlah jembatan seluruhnya}} \times 100\%$	PUPR	PUPR	
		Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	%	9,76	10,74	3,02	28,12	(Panjang Jalan Non Status dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Non Status) × 100%	PUPR	PUPR	
		Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	52	53,22	55,00	103,34	(Jumlah Titik/Wilayah dengan Akses Internet / Total Titik/Wilayah yang Ditargetkan) × 100%	Kominfo	Kominfo	
2.	Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	Persentase rumah layak huni	%	54,69	54,70	53,98	98,68	(Jumlah Rumah Layak Huni / Total Rumah yang Disurvei) × 100%	PRKP	PRKP	

		Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	100	100	87,50	87,50	(Jumlah Rumah Korban yang Telah Dibangun / Total Rumah Korban yang Direncanakan untuk Dibangun) × 100%	PRKP & BPBD	PRKP & BPBD	
		Rasio Elektrifikasi	Rasio	87,67	92,35			(Jumlah Rumah Tangga Berlistrik / Total Rumah Tangga) × 100%	PLN	PLN	
		Persentase penduduk berakses air minum layak	%	59,04	60,26	60,19	100	(Jumlah Penduduk yang Mengakses Air Minum Layak / Total Penduduk) × 100%	PRKP	PRKP	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	53,19	53,55	52,4	98	(Jumlah Rumah Tinggal dengan Sanitasi Layak / Total Rumah Tinggal yang Disurvei) × 100%	PRKP	PRKP	
3.	Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	Persentase sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	(Volume/Berat Sampah yang Tertangani / Total Timbunan Sampah) × 100%	DLH & PRKP	DLH & PRKP	
4.	Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	19,36	20,09	19,4	96,6	(Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik / Total Luas Daerah Irigasi) × 100%	PUPR & TPHP	PUPR & TPHP	
5.	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,79	79,01	49,60	63	IKLH = (IKU + IKA + ITL) / 3 (72 + 65 + 80) / 3 = 72.33	DLH	DLH	
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi (166,22)	90,24	IRB = (Bahaya × Kerentanan) / Kapasitas = (80 × 70) / 50 = 112	BPBD	BPBD	
MISI 2 : MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF											
1.	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,33	100,0	RLS= ∑ I = 1n (Pi×Ti) ∑ I = 1nPi	P & K	P & K	
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,63	100,0	HLS= ∑ j = 1m (Aj×Dj)	P & K	P & K	
2.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,37	67,73	94,9	$UHH = \frac{\sum x^w = oLx}{lo}$	Dinkes	Dinkes	

MISI. 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK											
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	Indeks	2,83	3,02	2,81	93	$\text{Indeks SPBE} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Domain}}{\text{Jumlah Domain}} \right) (\text{Skala } 1 - 5)$	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
		Indeks INOVASI DAerah	Indeks	36,69 (Inovatif)	47,69 (Inovatif)	43,11	90,39	$\text{Nilai Domain} = \left(\frac{\sum \text{Skor Inovasi}}{\text{Jumlah Inovasi dalam Domain}} \right)$	Balitbang	Balitbang	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,87 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	44,32	56,82	$\text{Nilai Unsur } i = \left(\frac{\text{Jumlah Skor Unsur } i}{\text{Jumlah Responden}} \right)$	Bag. Organisasi dan OPD terkait	Bag. Organisasi dan OPD terkait	
2.	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	CC	140,05	$\text{IRB} = (\sum \text{Nilai Pengungkit} \times 65\%) + (\sum \text{Nilai Hasil} \times 35\%)$	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	
3.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	B	100	$\text{Nilai Komponen } i = \text{Skor Komponen } i \times \left(\frac{\text{Bobot } i}{100} \right)$	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	
		Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	$\text{Skor Opini BPK} \text{ Skor Opini BPK} = \begin{cases} 100 & \text{jika WTP} \\ 80 & \text{jika WDP} \\ 60 & \text{jika TMP} \\ 40 & \text{jika TW} \end{cases}$	BPKAD	BPKAD	
		Capaian penilaian SPM	Skor	92,86	100	99,41	99		Bag. Pem	Bag. Pem	
4.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	Nilai Capaian Kinerja LPPD	Kategori	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)			$\text{Capaian } i = \left(\frac{\text{Realisasi } i}{\text{Target } i} \right) \times 100$	Bag. Pem	Bag. Pem	
		Indeks Reformasi Hukum	Angka	78	80,00	98,18	122,73	$\text{Indeks Reformasi Hukum} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Domain}}{\text{Jumlah Domain}} \right) (\text{Skala } 1 - 5)$	Bag. Hukum	Bag. Hukum	
		Indeks kematangan organisasi	indeks	28,1	28,3	28,30	100		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	

MISI. 6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING											
1.	Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	24,68	23,98	24,50	97,88	$\text{Angka Kemiskinan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100$	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM	
		Rasio Gini	Rasio	0,28	0,2-0,3	0,31	96	$\text{Rasio Gini} = \left(\frac{A}{A + B} \right)$			
2.	Penurunan prevalensi stunting	Persentase balita gizi buruk	%	15,9	13	6,30	206	$\text{Persentase Balita Gizi Buruk (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita yang Ditimbang}} \right) \times 100$	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	
		Prevalensi balita gizi kurang	%	34	31,3	26,9	116,36	$\text{Prevalensi Gizi Kurang (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Kurang}}{\text{Jumlah Balita yang Ditimbang}} \right) \times 100$	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	

		Indeks Kesejahteraan Sosial	%	51,15	55			$\text{Nilai Indikator } i = \left(\frac{\text{Capaian Aktual } i}{\text{Target atau Maksimum } i} \right) \times 100$			
--	--	-----------------------------	---	-------	----	--	--	---	--	--	--



LAMPIRAN III

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2025



LAMPIRAN IV

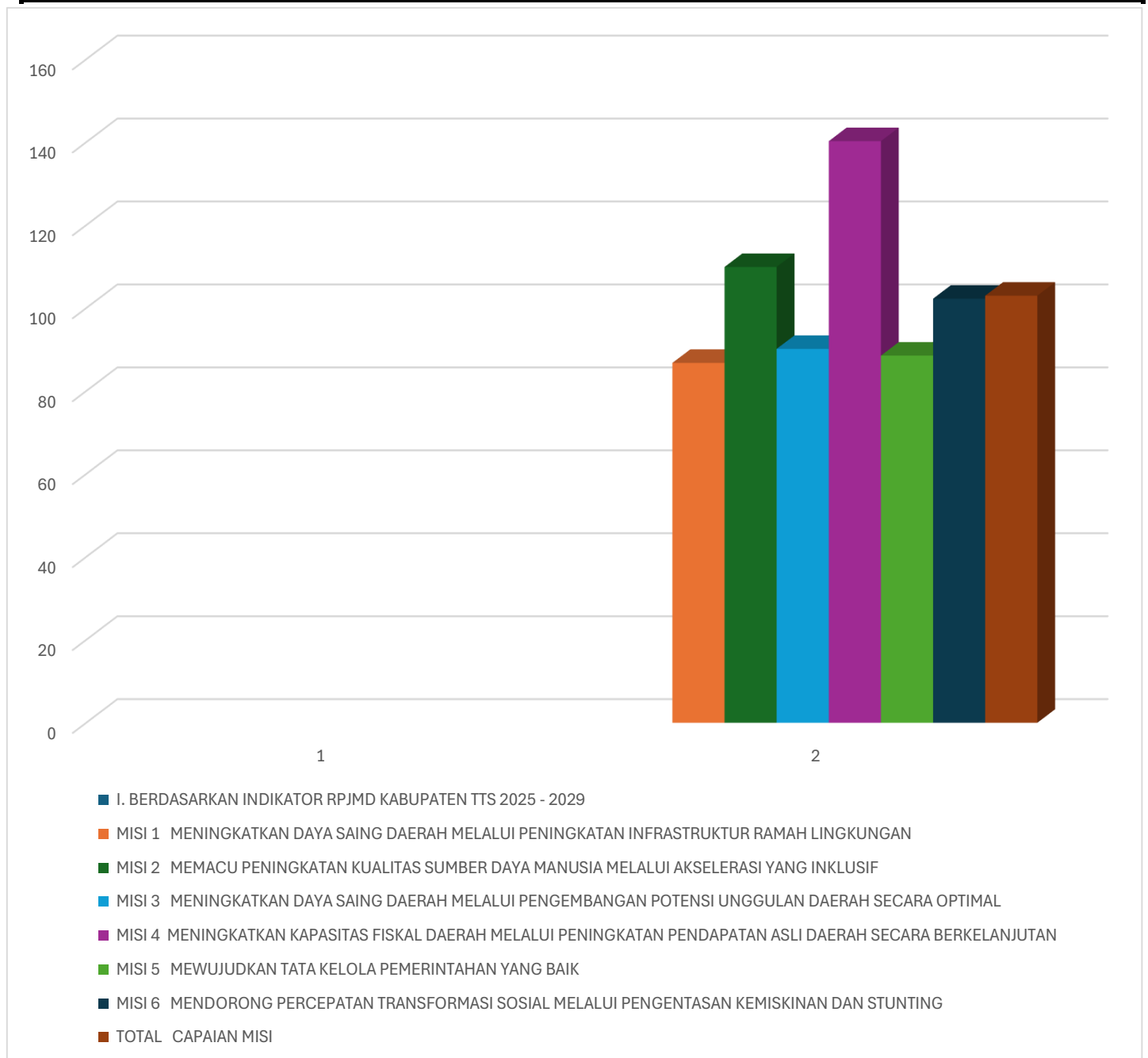
PENCAPAIAN MISI

TAHUN 2025

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025

MISI	SASARAN	REALISASI %
1	2	3
I. BERDASARKAN INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TTS 2025 - 2029		
MISI 1	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN	86,78
MISI 2	MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF	109,91
MISI 3	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL	90,2
MISI 4	MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN	140,3
MISI 5	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	88,5
MISI 6	MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING	102,3
TOTAL	CAPAIAN MISI	102,98

MISI	SASARAN	REALISASI %
1	2	3





LAMPIRAN V

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025

REALISASI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PERIODE 2025-2029

Lampiran V

VISI : TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGE T	REALIS ASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
1. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN	1. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi	1) Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,91	53,07	41,93	79,01	Persentase	61,03	68,7	PUPR
			2) persentase jembatan dalam kondisi baik.	%		-	72,73	0	Persentase	-	0,0	PUPR
			3) Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	%	9,76	10,74	3,02	28,12	Persentase	19,28	15,7	PUPR
			4) Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	52,00	53,22	55	103	Persentase	59,54	92,4	Kominfo
		2. Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	5) Persentase rumah layak huni	%	54,69	54,70	53,98	98,7	Persentase	54,88	98,4	PRKP
			6) Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	100	100	88	88	Persentase	100	87,5	PRKP & BPBD
			7) Rasio Elektrifikasi	Rasio	87,67	92,35	0	0,0	Rasio	100,00	0,0	PLN
			8) Persentase penduduk berakses air minum layak	%	59,04	60,26	60,19	99,9	Persentase	64,33	93,6	PRKP

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGE T	REALIS ASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
			9) Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	53,19	53,55	52,4	97,9	Persentase	55,37	94,6	PRKP
		Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	10) Persentase sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	Persentase	100	100,0	DLH & PRKP
		Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	11) Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	19,36	20	19,40	97	Persentase	23,35	83,1	PUPR & TPHP
		Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,79	79,01	49,60	62,78	Indeks	79,87	62,1	DLH
			13) Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi (166,22)	90,24	Indeks	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	90,2	BPBD
2. MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF	2. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat.	6. Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	14) Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,33	100	Tahun	7,93	92	P & K
			15) Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,63	100	Tahun	12,68	100	P & K
		7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	16) Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,37	67,73	94,9	Tahun	72,12	93,91	Dinkes

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGE T	REALIS ASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
	3. Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	8. Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	17) Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,96	96,22	96,04	99,81	Poin	97,52	98,48	P3A
			18) Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	52,73	53,73	52,73	98,1	Poin	59,73	88,28	P3A
			19) Indeks Perlindungan Anak	Angka	45,00	47,00	58,69	124,9	Angka	57	102,96	P3A
			20) Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	23,69	36,38	16,53	45,4	Persentase	100	16,53	Dinsos
		9. Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.	21) Persentase pemuda yang berprestasi	%	11,67	13,67	14,81	108	Persentase	23,67	63	Dispora
3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL	4. Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	10. Peningkatan pendapatan masyarakat	22) PDRB perkapita	Rupiah	21.283.000	22.243.525	1,9E+07	85	Rupiah	27.046.150	70	Dinas TPHP
			23) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63	2,63	3,57	135,7	Persentase	3	136	Nakertrans
			24) Inflasi	Nilai	0,02	0,01 - 2	1,77	0,0	Nilai	0,01 - 2	0	PPKUMKM

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGE T	REALIS ASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		11. Meningkatnya ketahanan pangan	25) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67,02	68,23	56,47	82,8	Indeks	74,28	76	DKP
			26) Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	77,00	81,13	94,91	Skor	82	99	DKP
4. MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN	5. Terwujudnya kemandirian fiskal daerah		27) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori	-	-	0,84	0,00	Kategori	-		
		12. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	28) Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	4	5,61	140,3	Persentase	9	62	Bappenda
5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	13. Peningkatan kualitas pelayanan publik	29) Indeks SPBE	Indeks	2,83	3,02	2,81	93,0	Indeks	3,97	70,78	Kominfo
			30) Indeks INOVASI DAERAH	Indeks	36,69 (Inovatif)	47,69 (Inovatif)	43,11	90,4	Indeks	91,69 (Sangat Inovatif)	47,01	Balitbang
			31) Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,87 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	44,32	56,82	Indeks	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	72,84	Balitbang
		14. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	32) Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	CC	100,0	Kategori	B	95,24	Bag. Organisasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		15. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	33) Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	B	100,0	Kategori	BB	87,84	Bag. Organisasi
			34) Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,0	Kategori	WTP	100	BPKAD
			35) Capaian penilaian SPM	Skor	92,86	100,00	99,41	99,4	Skor	100	99	Bag. Pem
		16. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	36) Nilai Capaian Kinerja LPPD	Kategori	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	-	0	Kategori	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)		Bag. Pem
			37) Indeks Reformasi Hukum	Angka	78,00	80,00	98,18	122,7	Angka	90,00	109,09	Bag. Hukum
			38) Indeks kematangan organisasi	indeks	28,10	28,30	28,30	100,0	indeks	40,00	70,75	Bag. Organisasi
6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING	7. Terwujudnya pengentasan kemiskinan	17. Penurunan angka kemiskinan	39) Angka Kemiskinan	%	24,68	23,98	24,50	97,88	Persentase	20,48	83,59	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM
			40) Rasio Gini	Rasio	0,28	0,2-0,3	0,31	96,0	Rasio	0,2 – 0,3	96	-
		18. Penurunan prevalensi stunting	41) Persentase balita gizi buruk	%	15,9	13,0	6,3	206,3	Persentase	11,5	182,54	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2025			TARGET RPJMD SAMPAI 2030		% CAPAIAN RPJMD s/d THN 2025	SKPD
						TARGE T	REALIS ASI	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
			42) Prevalensi balita gizi kurang	%	34	31,3	26,90	116,4	Persentase	27,9	96	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD
			43) Indeks Kesejahteraan Sosial	%	51,15	55	-	0,0	Persentase	80	0	-



LAMPIRAN VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025 – 2029

TAHUN 2025

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 - 2030

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						PENJELASAN	FORMULASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MISI 1: MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN																	
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur		Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,91	53,07	54,66	56,25	57,85	59,44	61,03	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah proporsi panjang jalan yang memenuhi standar kondisi baik terhadap total panjang jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jaringan Jalan) × 100%	PUPR	PUPR
					persentase jembatan dalam kondisi baik.	%											
					Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	%	9,76	10,74	11,96	13,42	15,13	17,08	19,28	Persentase Panjang Jaringan Jalan Non Status dalam Kondisi Baik adalah proporsi panjang jalan yang belum memiliki status resmi namun berada dalam kondisi baik, dibandingkan dengan total panjang jalan non status yang terdata.	(Panjang Jalan Non Status dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Non Status) × 100%	PUPR	PUPR

					Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	52	53,22	54,48	55,75	57,01	58,28	59,54	Persentase Jaringan Internet yang Dapat Diakses adalah proporsi wilayah atau titik layanan publik yang memiliki akses terhadap jaringan internet aktif dan fungsional, dibandingkan dengan total wilayah atau titik yang seharusnya memiliki akses.	(Jumlah Titik/Wilayah dengan Akses Internet / Total Titik/Wilayah yang Ditargetkan) × 100%	Kominfo	Kominfo
				Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	Persentase rumah layak huni	%	54,69	54,70	54,73	54,77	54,81	54,84	54,88	Rumah Layak Huni adalah bangunan tempat tinggal yang memenuhi standar minimum kelayakan dari sisi konstruksi, sanitasi, pencahayaan, ventilasi, air bersih, dan kepadatan penghuni. Kelayakan ini biasanya mengacu pada kriteria dari Kementerian PUPR, BPS, atau standar lokal yang ditetapkan pemerintah daerah.	(Jumlah Rumah Layak Huni / Total Rumah yang Disurvei) × 100%	PRKP	PRKP
					Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Rumah Korban Bencana yang Dibangun adalah proporsi rumah milik korban bencana yang telah selesai dibangun atau direhabilitasi oleh pemerintah, lembaga kemanusiaan, atau swadaya masyarakat, dibandingkan dengan total rumah korban yang terdampak dan terverifikasi untuk dibangun.	(Jumlah Rumah Korban yang Telah Dibangun / Total Rumah Korban yang Direncanakan untuk Dibangun) × 100%	PRKP dan BPBD	PRKP dan BPBD

					Rasio Elektrifikasi	Rasio	87,67	92,35	97,03	100	100	100	100	Rasio Elektrifikasi adalah persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap listrik (baik dari jaringan PLN maupun sumber non-PLN yang layak), dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga yang ada di suatu wilayah.	(Jumlah Rumah Tangga Berlistrik / Total Rumah Tangga) × 100%	PLN	PLN
					Persentase penduduk berakses air minum layak	%	59,04	60,26	61,07	61,89	62,70	63,52	64,33	Penduduk berakses Air Minum Layak adalah air yang berasal dari sumber yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun setelah pengolahan sederhana.	(Jumlah Penduduk yang Mengakses Air Minum Layak / Total Penduduk) × 100%	PRKP	PRKP
					Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	53,19	53,55	53,92	54,28	54,61	55,01	55,37	Rumah tinggal bersanitasi Layak adalah sistem pembuangan limbah domestik (terutama tinja) yang aman, higienis, dan tidak mencemari lingkungan. Rumah tinggal bersanitasi layak berarti rumah tersebut memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar teknis dan kesehatan.	(Jumlah Rumah Tinggal dengan Sanitasi Layak / Total Rumah Tinggal yang Disurvei) × 100%	PRKP	PRKP

				Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	Persentase sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Sampah yang Tertangani adalah proporsi volume atau berat sampah yang berhasil dikumpulkan, diangkut, dan dikelola secara aman (melalui pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan akhir yang sesuai), dibandingkan dengan total timbulan sampah yang dihasilkan di suatu wilayah.	(Volume/Berat Sampah yang Tertangani / Total Timbulan Sampah) × 100%	DLH, PRKP	DLH, PRKP
				Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	19,36	20,03	20,69	21,36	22,02	22,69	23,35	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik adalah proporsi luas daerah irigasi yang berfungsi optimal (baik secara fisik maupun operasional) terhadap total luas daerah irigasi yang ada di suatu wilayah.	(Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik / Total Luas Daerah Irigasi) × 100%	PUPR dan TPH	PUPR dan TPH
				Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,79	79,01	79,19	79,36	79,53	79,7	79,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah angka indeks yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan.	IKLH = (IKU + IKA + ITL) / 3 IKLH = (72 + 65 + 80) / 3 = 72.33	DLH	DLH

					Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Tinggi	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu wilayah berdasarkan kombinasi antara potensi bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) penanggulangan.	IRB = (Bahaya x Kerentanan) / Kapasitas IRB = (80 x 70) / 50 = 112	BPBD	BPBD
MISI. 2. MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF																	
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia		Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,45	7,57	7,69	7,81	7,93	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, baik yang sedang maupun telah menyelesaikan pendidikan.	$RLS = \sum I = 1n (Pi \times Ti) \sum I = 1n Pi$	P dan K	P dan K
					Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,64	12,65	12,66	12,67	12,68	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia tertentu (biasanya usia 7 tahun) selama hidupnya, berdasarkan pola partisipasi pendidikan saat ini.	$HLS = \sum j = 1m (Aj \times Dj)$	P dan K	P dan K

				Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,37	71,51	71,67	71,82	71,97	72,12	Usia Harapan Hidup adalah indikator demografi yang menunjukkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya.	$UHH = \frac{\sum x^w = oLx}{lo}$	Dinkes	Dinkes
3.	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	Persentase peningkatan partisipasi aktif dan akses kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pemuda) dalam proses pembangunan daerah.		Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,96	96,22	96,48	96,74	97,00	97,26	97,52	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menunjukkan kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama: Kesehatan – diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH), Pendidikan – diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Ekonomi – diukur melalui Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan.	IPG = (Indeks Pembangunan Perempuan / Indeks Pembangunan Laki-laki) × 100	P3A	P3A

					Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	52,73	53,73	54,73	55,73	56,73	57,73	59,73	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur sejauh mana perempuan berperan aktif dan diberdayakan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Berbeda dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang fokus pada capaian, IDG fokus pada partisipasi dan kontrol perempuan dalam pembangunan.	IDG = (Skor Partisipasi Perempuan / Skor Maksimal) × 100	P3A	P3A
					Indeks Perlindungan Anak	Angka	45	47	49	51	53	55	57	Indeks Perlindungan Anak adalah indikator komposit yang mengukur sejauh mana anak-anak di suatu wilayah mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat, baik dalam aspek hukum, sosial, pendidikan, maupun kesehatan.	$\text{Nilai Indikator } i = \left(\frac{\text{capaian aktual } i}{\text{Target atau maksimum}} \right) \times 100$	P3A	P3A
					Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	23,69	36,38	49,07	61,76	74,45	87,23	100	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas yang telah menerima fasilitas layanan publik, seperti: Bantuan sosial atau alat bantu, Akses pendidikan atau pelatihan kerja, Layanan kesehatan atau rehabilitasi dan Pendampingan hukum atau sosial	$\text{Persentase Difasilitasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terdata}} \right) \times 100$	Dinsos	Dinsos

[illegible]

				Peningkatan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita	Rupiah	21.283.000	22.243.525	23.204.050	24.164.575	25.125.100	26.085.625	27.046.150	PDRB Per Kapita adalah indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini digunakan untuk: Mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Membandingkan kinerja ekonomi antar daerah Menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi	$\text{PDRB Per Kapita} = \left(\frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right)$	Dinas TPHP	Dinas TPHP
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.633	2.631	2.629	2.626	2.624	2.622	2,62	TPT adalah indikator yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. TPT mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.	$\text{TPT (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100$	Nakertrans	Nakertrans
					Inflasi	Nilai	0,02	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	Inflasi adalah indikator ekonomi yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi mencerminkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.	$\text{Inflasi (\%)} = \left(\frac{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK) periode akhir} - \text{IHK periode awal}}{\text{IHK periode awal}} \right) \times 100$	dinas UMKM	dinas UMKM

[illegible]

				Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	4	5	6	7	8	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator yang mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yaitu seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal dan semakin kecil ketergantungannya pada transfer dari pemerintah pusat.	$\text{Persentase PAD} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right) \times 100$	Bappenda	Bappenda
--	--	--	--	--	---	---	------	---	---	---	---	---	---	--	---	----------	----------

MISI. 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK																	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase perangkat daerah yang memenuhi standar kinerja tata kelola pemerintahan (efektivitas, efisiensi, profesionalisme, integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas)	%	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	Indeks	2,83	3,02	3,21	3,4	3,59	3,78	3,97	Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan integrasi layanan digital dalam tata kelola pemerintahan. Indeks ini digunakan sebagai dasar evaluasi transformasi digital birokrasi, penetapan kebijakan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.	$\text{Indeks SPBE} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Domain}}{\text{Jumlah Domain}} \right) (\text{Skala } 1 - 5)$	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
					Indeks INOVASI DAerah	Indeks	36,69 (Inovatif)	47,69 (Inovatif)	58,69 (Inovatif)	69,69 (Sangat Inovatif)	80,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)	Indeks Inovasi Daerah adalah indikator komposit yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk lainnya yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.	$\text{Nilai Domain} = \left(\frac{\sum \text{Skor Inovasi}}{\text{Jumlah Inovasi dalam Domain}} \right)$	Balitbang	Balitbang

					Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,87 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara layanan. IKM menjadi alat ukur persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan seperti prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, dan sarana prasarana.	$\text{Nilai Unsur } i = \left(\frac{\text{Jumlah Skor Unsur } i}{\text{Jumlah Responden}} \right)$	Bag. Organisasi dan OPD terkait	Bag. Organisasi dan OPD terkait
				Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	C	CC	CC	B	Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana instansi telah mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	$\text{IRB} = (\Sigma \text{Nilai Pengungkit} \times 65\%) + (\Sigma \text{Nilai Hasil} \times 35\%)$	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
				Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB	Nilai Capaian SAKIP adalah indikator yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan pencapaian kinerja oleh instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh KemenPANRB dan mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berbasis hasil.	$\text{Nilai Komponen } i = \text{Skor Komponen } i \times \left(\frac{\text{Bobot } i}{100} \right)$	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi

					Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Skor Opini BPK $\text{Skor Opini BPK} = \begin{cases} 100 & \text{jika WTP} \\ 80 & \text{jika WDP} \\ 60 & \text{jika TMP} \\ 40 & \text{jika TW} \end{cases}$	BPKAD	BPKAD
					Capaian penilaian SPM	Skor	92,86	100	100	100	100	100	100			Bag. Pem	Bag. Pem
				Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	Nilai Capaian Kinerja LPPD	Kategori	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Nilai Capaian Kinerja LPPD adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan target dan realisasi kinerja yang dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian Dalam Negeri.	$\text{Capaian } i = \left(\frac{\text{Realisasi } i}{\text{Target } i} \right) \times 100$	Bag. Pem	Bag. Pem

					Indeks Reformasi Hukum	Indeks	78	80	82	84	86	88	90	Indeks Reformasi Hukum adalah indikator komposit yang mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi hukum di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan efektivitas perbaikan sistem hukum, regulasi, akses keadilan, dan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.	$\text{Indeks Reformasi Hukum} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Domain}}{\text{Jumlah Domain}} \right) (\text{Skala 1-5})$	Bag. Hukum	Bag. Hukum
					Indeks kematangan organisasi	indeks	28,1	28,3	30	32	35	37	40				
MISI. 6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING																	
	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	24,68	23,98	23,28	22,58	21,86	21,18	20,48	Angka Kemiskinan adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan (seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi).	$\text{Angka Kemiskinan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100$	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM

					Rasio Gini	Rasio	0,28	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	Rasio Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau konsumsi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin timpang distribusi pendapatan antar penduduk.	$\text{Rasio Gini} = \left(\frac{A}{A + B} \right)$		
	Terwujudnya pengentasan stunting	Prevalensi stunting		Penurunan prevalensi stunting	Persentase balita gizi buruk	%	15,9	13	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	Persentase Balita Gizi Buruk adalah indikator yang menunjukkan proporsi balita usia 0–59 bulan yang mengalami gizi buruk dibandingkan dengan total balita yang ditimbang atau diperiksa status gizinya. Gizi buruk merupakan kondisi balita dengan berat badan sangat rendah untuk tinggi badan, dan dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak.	$\text{Persentase Balita Gizi Buruk (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita yang Ditimbang}} \right) \times 100$	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD
					Prevalensi balita gizi kurang	%	34	31,3	30,7	30	29,3	28,6	27,9	Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah indikator yang menunjukkan proporsi balita usia 0–59 bulan yang mengalami gizi kurang dibandingkan dengan total balita yang ditimbang atau diperiksa status gizinya. Gizi kurang merupakan kondisi balita dengan berat badan rendah untuk usia, namun belum masuk kategori gizi buruk.	$\text{Prevalensi Gizi Kurang (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Kurang}}{\text{Jumlah Balita yang Ditimbang}} \right) \times 100$	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD	P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, KomInfo, Dukcapil, P3A, Sosial dan PMD

[illegible]